



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan. A. Syairani Komp Perkantoran Gagas Pelahari 70814 Telp (0512) 21113

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 900/43/ BPBD /2022

TENTANG
TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

BUPATI TANAH LAUT,

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022;

MENINGAT : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Esselon II, Esselon III dan Esselon IV secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP;

5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- MENETAPAKAN** :
- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- KEDUA** : Tugas Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama adalah :
- a. Melaksanakan terkait mekanisme Laporan Kinerja Pemerintah : Perencanaan, Pengumpulan data, Pengukuran kinerja, Pemantauan, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja.
 - b. Mengkoordinasikan secara bersama dalam rapat berkala Triwulan (3 bulanan) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
 - c. Bertanggung jawab terhadap segala hasil Evaluasi dan Revisi yang dirumuskan dan ditetapkan secara bersama.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : **Januari 2022**



**KEPALA BPBD
KABUPATEN TANAH LAUT**

Ir. SAHRUDIN
Penata Muda Tk. I (IV/b)
NIP. 19661210 199403 1 007

Lampiran: Keputusan Kepala Pelaksana BPBD**Kab.Tanah Laut****Nomor : 900/43/ BPBD /2022****Tanggal : Januari 2022**

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	JABATAN	DITUNJUK/ DIANGKAT SEBAGAI	KET.
1	Ir. Sahrudin NIP. 19661210 199403 1 007 Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Pelaksana BPBD Kab.Tanah Laut	Ketua	
2	Nuriah, S. Sos NIP. 1740320 199503 2 005 Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris Pada BPBD Kab.Tanah Laut	Wakil Ketua	
3	Husairi, A.Md NIP. 19660505 199002 1 001 Penata Tk. I.(III/d)	Kasi Kedaruratan dan Logistik Pada BPBD Kab. Tanah Laut	Anggota	
4	Bakti Purwanto, ST NIP. 19800608 201502 1 010 Penata Tk. I (III/d)	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Kab. Tanah Laut	Anggota	
5	Juni H, S.Pt Nip. 19700101 201001 1 001 Penata Tk. I.(III/d)	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pada BPBD Kab.Tanah Laut	Anggota	
6	Laratna Handayani NIP. 19730725200701 2 012 Pengatur Tk I (II/d).	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Anggota	

**KEPALA BPBD
KABUPATEN TANAH LAUT**




Ir. SAHRUDIN
Penata Muda Tk. I (IV/b)
NIP. 19661210 199403 1 007



**PEMERINTAH DAERAH KAB TANAH LAUT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

SEKRETARIS

Nomor SOP	900/ 15 /SOP.SEK/2023
Tgl. Pembuatan	3 Januari 2023
Tgl. Revisi	
Tgl Pengesahaan	
Disahkan oleh	KEPALA PELAKSANA  Ir. SAHRUDIN NIP. 19661210 199403 1 007
Nama SOP	LAKIP

Dasar Hukum 1. Permenpan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi AKIP 2. Permenpan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Instansi Pemerintah 3. Permenpan Nomor 20 Tahun 2013 tentang perubahan lampiran Permenpan Nomor 25 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja	Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami kebijakan mengenai LAKIP 2. Memiliki pemahaman tentang LAKIP 3. Memiliki kemampuan menganalisa LAKIP
Keterkaitan 1. RENSTRA SKPD 4. IKU SKPD 2. APBD 3. DPA	Peralatan/Perlengkapan 1. Pedoman penyusunan LAKIP 2. Perangkat komputer dengan instalasi program Microsoft Office, Archview dan koneksi internet 3. Memo / Disposisi
Peringatan 1. Diperlukan Koordinasi dengan seluruh kasi yang terkait.	Pencatatan & Pendataan 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual/ordner.

**(SOP) PENYUSUNAN LAKIP PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Ket
		Tim Akuntabilitas	Kepala BPBD	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Badan memerintahkan Sekretaris untuk membentuk Tim Penyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah				Perintah Kepala	30 menit	Data Tim Penyusun LAKIP	
2	Sekretaris selaku menangani keuangan melakukan koordinasi dengan Kasi – kasi terkait untuk keperluan data penyusunan LAKIP				Disposisi Penyusunan LAKIP	4 hari	Disposisi penyusunan LAKIP	
3	Menyusun draf LAKIP BPBD				Draf LAKIP	2 hari	Draf LAKIP	
4	Kasi - Kasi menyampaikan draf penyusunan LAKIP kepada Sekretaris untuk dilakukan reviu dan analisis.				Draf LAKIP	30 menit	Reviu Draf LAKIP	
5	Hasil reviu dan analisis oleh Sekretaris di sampaikan ke Kepala sebagai bahan pembahasan dalam rapat				Draf LAKIP	2 hari	Draf LAKIP	
6	Revisi draf LAKIP berdasar hasil rapat selanjutnya menyusun draf final LAKIP				Draf LAKIP	1 hari	Draf LAKIP	
7	Reviu draf final LAKIP BPBD				Draf final LAKIP	1,5 jam	Draf final LAKIP	
8	Tanda Tangan Draf Final LAKIP BPBD				Draf final LAKIP	1 Jam	Draf final LAKIP	
9	Penyerahan LAKIP final BPBD untuk didistribusikan ke pihak terkait				LAKIP final	2 jam	LAKIP final	



Kepala Pelaksana

Ir. SAHRUDIN

NIP. 19661210 199403 1 007

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, Laporan Kinerja Instansi (LKj) ini disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggung jawab pelaksanaan kinerja untuk Tahun 2022.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Kabupaten Tanah Laut di masa - masa mendatang..... Aamiin.

Pelaihari, Januari 2023

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Laut**



Ir. SAHRUDIN
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19661210 199403 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indicator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indicator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2018 – 2023.

Indikator yang digunakan adalah indicator kinerja utama sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap masyarakat yang terdampak bencana yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut.

Pada Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut menargetkan Capaian I K U Badan penanggulangan bencana Daerah sebesar 84,50 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan **B** dengan kategory **BAIK**. Keberhasilan tersebut salah satunya didukung adanya bebrbagai faktor di antaranya :

1. Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik yaitu Tim reaksi Cepat (TRC) dan Pusat pengendalian operasi (Pusdalops) penanggulanganbencana;
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebencanaan yang cukup memadai pada Pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut
3. Tersedianya kotak pengaduan pelayanan (kotak saran, saluran telepon dan email)
4. Petugas pelayanan yang ramah, sopan dan santun dalam melayani masyarakat.
5. Inovasi percepatan pelayanan kebencanaan melalui piket harian yang dilakukan di Posko Induk BPBD dan Posko yang ada di Kecamatan Kintap walaupun pelayanan pada hari libur.

Demikian dengan disusunnya LAPKIN ini dapat memberikan informasi dan manfaat serta evaluasi dalam pengambilan keputusan guna lebih mendorong peningkatan kinerja maupun kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Tanah Laut di masa yang akan datang.

Pelaihari, Januari 2023

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Laut**



Ir. SAHRUDIN
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19661210 199403 1 007

	Hal
KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi.....	2
C. Isu Strategis.....	10
D. Produk dan Layanan.....	10
E. Sistematika Penyajian.....	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
A. Visi RPJMD.....	15
B. Misi RPJMD.....	15
C. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	17
D. Indikator Kinerja Utama.....	23
E. Perjanjian Kinerja.....	23
F. Program dan Kegiatan.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI.....	32
1. Sasaran RPJMD.....	33
2. Eselon III (kepala Pelaksana BPBD).....	43
3. Eselon IV (Sekretaris dan Kasi-Kasi).....	56
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	73
1. Anggaran dan Ringkasan realisasi APBD Tahun 2021.....	73
2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program.....	73
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021.....	74
BAB IV PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	80
LAMPIRAN	
1. IKU	
2. Pernyataan hasil Reviu	
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 bertandatangan	
4. Cascading/Pohon Kinerja	
5. Capaian per triwulan (1-4)	
6. Monev Renstra	
7. Matrik Keselarasan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Atas dasar tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut menyusun Laporan Kinerja (LKj) secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

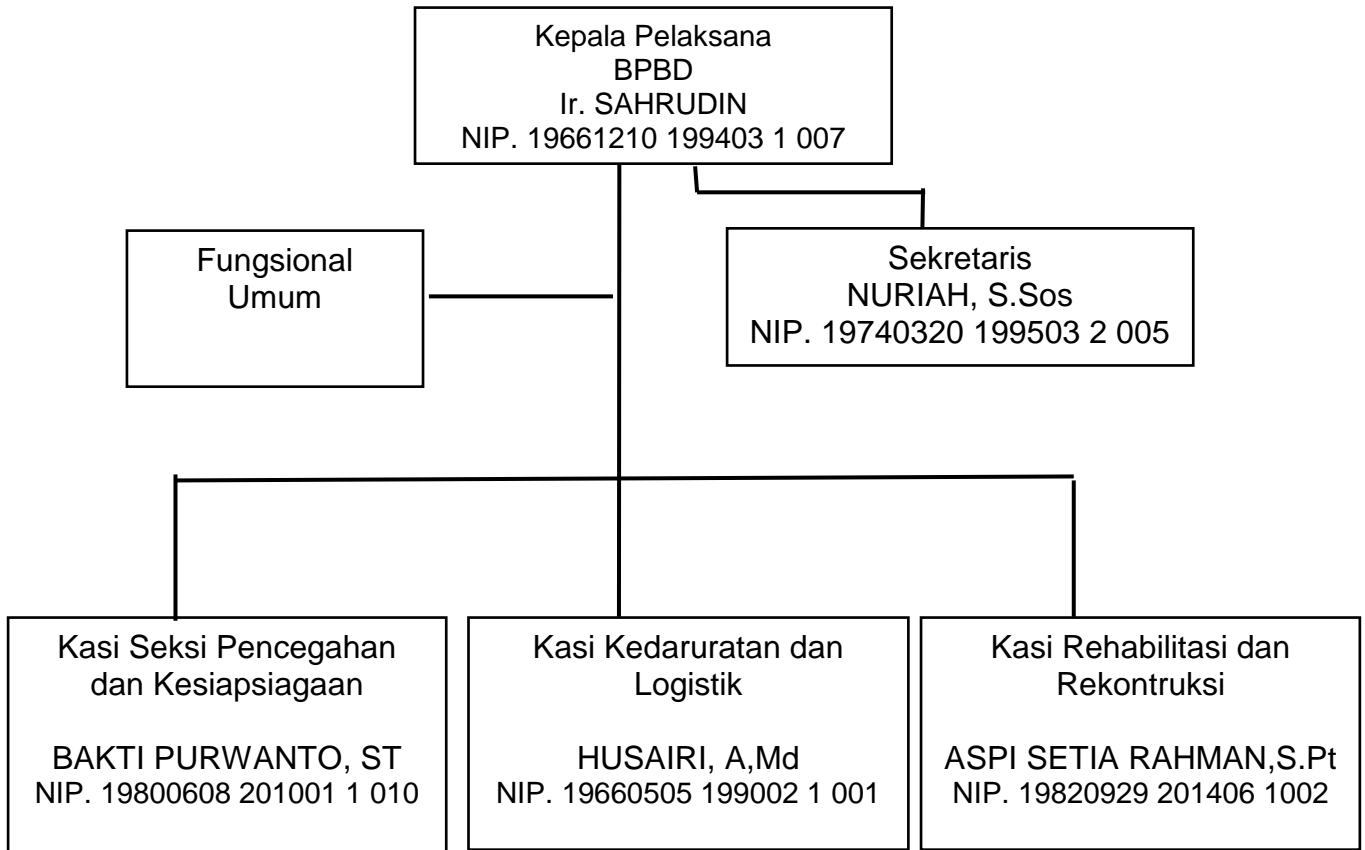
B. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari SKPD di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut. Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana Badan
- b. Sekretaris Badan
- c. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- d. Kasi Kedaruratan dan Logistik
- e. Kasi rehabilitasi dan Rekonstruksi

Lampiran IV Peraturan Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 10 Tahun 2013
Tanggal : 20 Agustus 2014

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut BPBD Kabupaten Tanah Laut merupakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah

Tugas Pokok BPBD Kabupaten Tanah Laut yaitu :

URAIAN TUGAS POKOK

a. Kepala Pelaksana, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkup urusan dan wewenangnya;
- b) merumuskan kebijakan teknis dan operasional di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) melaksanakan pembinaan teknis penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- d) melaksanakan kemitraan dalam peningkatan penanganan penanggulangan bencana;
- e) membina, mengawasi dan mengendalikan program penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan prundang-undangan;
- f) membuat laporan kinerja bidang penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya kepada Bupati; dan
- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat, terdiri dari :

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksa-

naan tugas satuan organisasi Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. Perumusan kebijakan teknis Kesekretariatan;
3. Penyelenggaraan urusan umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Penyelenggaraan urusan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Penyelenggaraan pusat data dan informasi kebencanaan;
7. Pengkoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana;
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
9. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan yaitu :

Seksi Mitigasi Bencana dalam menjalankan tugas menyelenggarakan, membina dan mengkoordinasikan pencegahan dan mitigasi bencana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Mitigasi Bencana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan mitigasi bencana;
- c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pencegahan dan mitigasi bencana;
- d. Pembinaan pencegahan dan mitigasi bencana;
- e. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
- f. Pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana;

- g. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian upaya pengurangan resiko bencana; dan
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Mitigasi Bencana.

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengkoordinasikan kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat. Dalam menjalankan tugas Seksi Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Kesiapsiagaan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat;
- c. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengkoordinasian kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- d. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, dan pengembangan prosedur penanggulangan bencana;
- e. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana melalui gladi lapang, simulasi, wajib latih dan sosialisasi penanggulangan bencana;
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

d. Seksi Kedaruratan dan logistik

Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana. Seksi kedaruratan bencana dan Operasional Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
- c. Penyelenggaraan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
- d. Pengkoordinasian operasional penanggulangan bencana;
- e. Penyelenggaraan analisis dan pengkoordinasian pemantauan status dan tingkatan keadaan darurat bencana;
- f. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pelatihan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
- g. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberian rasa aman pada masyarakat; dan
- h. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian sistem komunikasi kebencanaan; dan
- i. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana.

Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penanganan pengungsi dan penyediaan logistik penanggulangan bencana. Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan pengungsi dan penyediaan logistik Penanggulangan Bencana;
- c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penanganan pengungsi;
- d. Penyelenggaraan pengembangan prosedur penanganan pengungsi;
- e. Penyelenggaraan penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- f. Penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana penanggulangan bencana;

- g. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyediaan dan penyaluran logistik penanggulangan bencana;
- h. Penyelenggaraan, pengendalian, dan pengkoordinasian bantuan penanggulangan bencana; dan
- i. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana.

e. Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi yaitu :

Rehabilitasi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan rehabilitasi. Rehabilitasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja rehabilitasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi;
- c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian analisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi rehabilitasi;
- d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai ketinggian yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja rehabilitasi.

Rekontruksi mempunyai tugas menyelenggaraan dan mengkoordinasikan rekontruksi. Rekontruksi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja rekontruksi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rekontruksi;
- c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi rekontruksi;
- d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh

- dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana; dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Rekonstruksi.

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut memiliki pegawai sebanyak 17 (Lima Belas) orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 17 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Pelaksana BPBD sebanyak 1 orang, Sekretaris sebanyak 1 orang, Kepala Seksi sebanyak 3 orang dan staf pelaksana sebanyak 12 orang serta PTT Administrasi sebanyak 8 orang, PTT Pusdalops sebanyak 6 orang dan PTT Petugas Rescuer sebanyak 25. Detail lebih lanjut tentang komposisi kepegawaian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1 Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	PTT	Jumlah
1	Kepala Pelaksana	0	1				1
2	Sekretaris			1			1
3	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik			1			1
4	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan			1			1
5	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi			1			1
6	Staf PNS				12		12
7	PTT					39	39
	JUMLAH	0	1	4	12	39	56

C. ISU STRATEGIS

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada BPBD Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan Indeks risiko bencana (IRB) di Kabupaten Tanah Laut
2. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
4. Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan bekerjasama dengan instansi lain baik vertikal maupun horizontal;
6. Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi;
7. Penyediaan dana rencana kontigensi dengan dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut.

D. PRODUK DAN LAYANAN

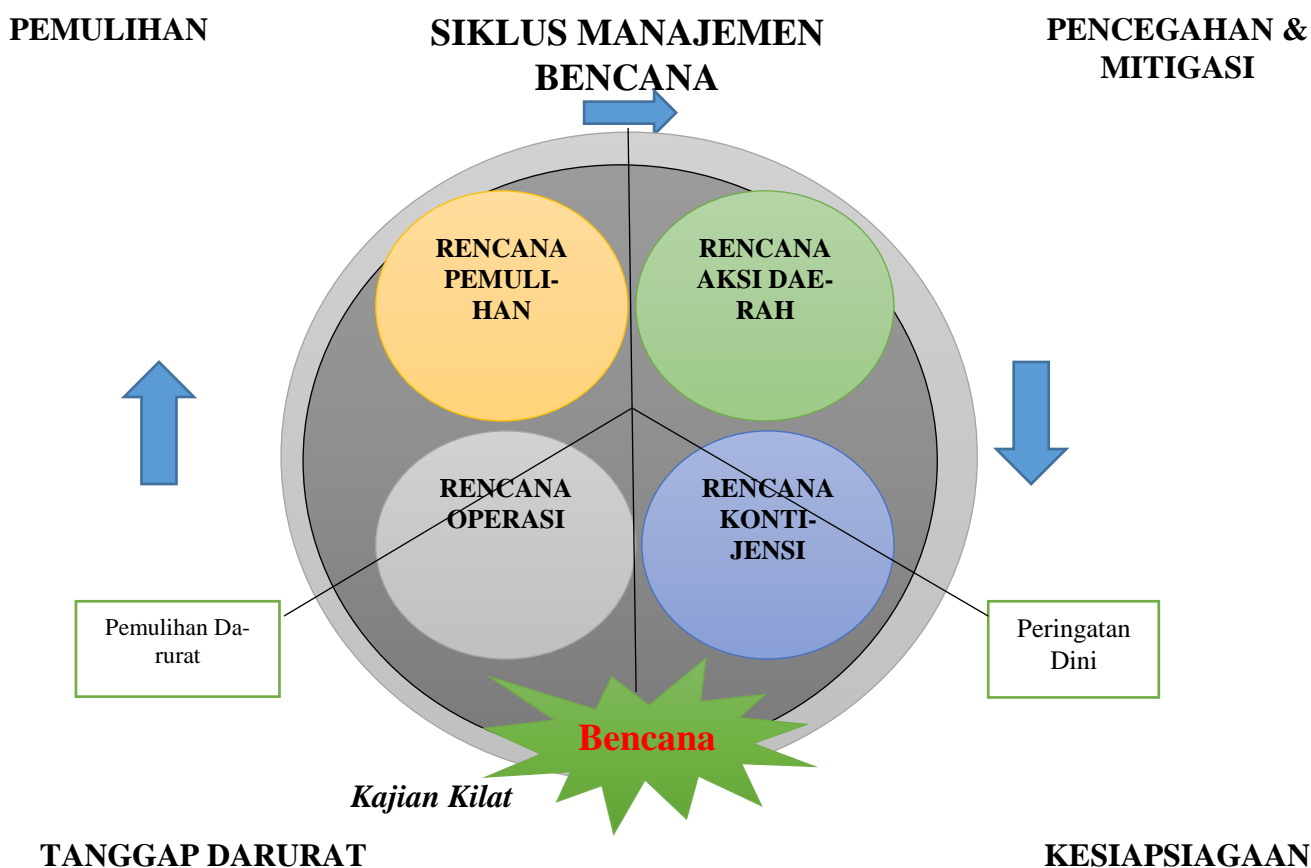
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 66 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

1. Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan memberikan pelayanan menyelenggarakan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yaitu dengan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan dalam menanggulangi bencana.
2. Bidang Kedaruratan Dan Logistik memberikan pelayanan menyelenggarakan Kedaruratan dan Logistik meliputi pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

melalui penyaluran logistik, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, penan-
gangan pengungsi pada saat tanggap darurat dan pemasangan tenda untuk
pengungsian.

3. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi memberikan pelayanan perbaikan dan
pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai ketinggian
yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk nor-
malisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan ke-
hidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut dimulai dari kegiatan
perencanaan sampai kepada tahap implementasi. Kegiatan ini tidak pernah berhenti
karena kegiatan penanggulangan bencana merupakan sebuah siklus yang terus
menyesuaikan dengan keadaan. Siklus penanggulangan bencana dapat terlihat pada
gambar di bawah ini:



D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja
- F. Program dan Kegiatan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - 1. Sasaran RPJMD
 - 2. Eselon III (Kepala BPBD)
 - 1) Eselon IV Sekretaris
 - 2) Eselon IV Kasi Kedaruratan dan Logistik
 - 3) Eselon IV Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - 4) Eselon IV Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- B. Akuntabilitas Keuangan
 - 1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2022
 - 2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program
 - 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022

BAB IV : PENUTUP

A. Simpulan

B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
4. Cascading / Pohon Kinerja
5. Capaian Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. VISI RPJMD

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi diarahkan. Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan arah langkah kedepan dengan penuh kepastian. Visi mampu merupakan gambaran konseptual tentang hari depan yang ingin diwujudkan dan mampu menyemangati.

Bertumpu pada konsep visi tersebut, Kabupaten Tanah Laut menetapkan visi ***“ Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi, ”***.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki keunggulan-keunggulan atau kelebihan-kelebihan dan daya saing yang tinggi menuju **“ Terwujudnya Tanah Laut Yang Berintreraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)**

Keunggulan ini dapat diwujudkan mempersyaratkan adanya potensi dan kompetensi untuk bisa lebih produktif, memiliki daya kreatif dan inovatif yang tinggi sesuai tuntutan lingkungan strategi yang senantiasa terus mengalami perubahan dan tumbuh kembang yang semakin dinamis dan kompleks. Lebih produktif berarti menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan, dan memiliki daya kreasi dan inovasi produk secara berkelanjutan yang tinggi, serta memiliki daya saing, baik daya saing komparatif maupun daya saing manfaat (*comparative and advantage competitive*) untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanah Laut menjadi masyarakat yang sejahtera dari segi ekonomi, serta rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat yang dilandasi dengan meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berkembangnya kehidupan demokrasi dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.

Kompetensi ini merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan, sikap dan perilaku serta etika yang diperlukan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan peran yang dimainkannya. Karenanya menuntut adanya “*Sense of responsibility and professionally*” dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan peran masing-masing. *Sense of responsibility*, menghendaki setiap pelaku kepentingan memiliki rasa bertanggung jawab, yakni mau dan mampu bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala sikap, perilaku, tindakan dalam bingkai melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya. Sementara *professionally* lebih mengarah pada kompetensi bagi setiap pelaku kepentingan. Kompetensi merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya.

B. MISI RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tugas dan fungsi BPBD dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Tanah Laut 2018 - 2023 selaras dengan misi ke-2, Ke 3 dan Ke 5 Yaitu :

Misi 2. “Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif “

Penjabaran Misi 2 :

- Menciptakan inovasi dalam pelayanan Kebencanaan melalui penggunaan peralatan yang berstandar untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kebencanaan.

Misi 3 “Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”

Penjabaran Misi 3 :

- Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan Kebencanaan di Kabupaten Tanah laut

Misi 5 “ Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

Penjabaran Misi 5 :

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana bahwa penanganan penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi nonpemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, sehingga BPBD Kabupaten Tanah Laut harus Membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten / kota di Propinsi Kalimantan Selatan.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah :

- a. Tercapainya kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang terdampak bencana.
- b. Tercapainya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.
- c. Tercapainya kualitas pemenuhan dukungan operasional organisasi

Untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, setidaknya diperlukan 3 (tiga) strategi yang didukung formalisasi kebijakan yang membuat masyarakat tangguh dan mampu menghadapi bencana. Strategi tersebut adalah:

1. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat
2. Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi organisasi

Tabel 3

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2019 – 2023

Visi : Terwujudnya Tanah Laut yang “BERINTERAKSI” (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Misi ke 5 yaitu: Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Tercapainya kepedulian dan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana	Persentase Penanggulangan bencana	100%	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	82,15 (BAIK)	85,25 (BAIK)	86,50 (BAIK)	87,55 (BAIK)	87,75 (BAIK)

						Indeks Risiko Ben- can (Skor)	150 (tinggi)	135 (Se- dang)	130 (Se- dang)	125 (se- dang)	120 (se- dang)
2		Tercapainya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa Penyediaan peralatan logistik dan penanganan Rehabilitasi Rekonstruksi pasca bencana	Jumlah Dokumen Pe- nanggulangan Bencana	3 Doku- men	Meningkatnya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana berupa penyediaan peralatan dan logistik dan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah Masyarakat/Kelompok masyarakat yang mengikuti sosialisasi	275 orang	120 orang	150 orang	150 orang	160 orang
						Jumlah Tenaga TRC yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang
						Jumlah Daerah Rawan Bencana	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec
						Jumlah Laporan kegiatan forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	1 Lapor an	1 Lapor an	1 Lapor an	1 Lapor an	1 Lapor an
						Jumlah Dokumen Bencana yang tersedia	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
						Jumlah Desa Tangguh bencana	3 De- sa	2 De- sa	2 De- sa	2 De- sa	2 De- sa
						Jumlah jenis Bencana yang di	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis

layani					
Jumlah logistik yang diterima oleh Korban yang terdampak bencana	250 Paket	300 Paket	300 Paket	350 Paket	350 Paket
Jumlah Sarana dan Prasarana kebencanaan yang terpenuhi	27 Buah	19 buah	25 Buah	30 Buah	35 buah
jumlah laporan kejadian Bencana	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Jumlah Koordinasi pasca bencana	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
jumlah Lokasi yang terdampak pasca bencana.	11 Kec	11 Kec	11 kec	11 kec	11 kec
Jumlah Desa/Kec yang di Rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya pasca	4 Desa/Kec	4 Desa/Kec	4 Desa/Kec	4 Desa/Kec	4 Desa/Kec

					bencana					
3	Tercapainya kualitas pemenuhan dukungan operasional organisasi			Meingkatnya kualitas pelayanan Administrasi Organisasi	Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%
				Meingkatnya kualitas pelayanan Administrasi Organisasi	Jumlah sarana dan prasarana yang dapat terpenuhi sesuai aturan	6 Buah	14 Buah	15 Buah	16 Buah	17 Buah
				Meingkatnya kualitas pelayanan Administrasi Organisasi	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara dan dapat di fungsikan	19 Buah	20 Buah	22 Buah	23 Buah	25 Buah
				Meingkatnya kualitas pelayanan Administrasi Organisasi	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
					Jumlah Event yang di ikuti	2 Pameran	2 Pameran	2 Pameran	2 Pameran	2 Pameran

				Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
				Persentase Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Indikaor Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 – 2023, adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber data
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana	Hasil Survei	- Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan - Seksi Kedaruratan dan Logistik
		Indeks Risiko Bencana	(Skor)	- Seksi rehabilitasi dan Rekonstruksi

- Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah laut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Tanah Laut 2018 - 2023 sesuai dengan Sasaran Renstra BPBD adalah Menciptakan inovasi dalam pelayanan Kebencanaan melalui penggunaan peralatan yang telah terbukti untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat dan Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan Kebencanaan di Kabupaten Tanah laut sehingga bisa meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat bagi masyarakat yang terdampak bencana.

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka pada tahun 2022 ditetapkan target kinerja tahunan yang telah di tandatangani oleh Bupati Tanah Laut, sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KAB. TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana	87,55 (BAIK)	Kepala Pelaksana BPBD
		- Indeks Resiko Bencana (Skor)	125 (Sedang)	
2.	Meningkatkannya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana berupa penyediaan peralatan, logistik, dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	- Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti Sosialisasi.	150 orang	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		- Jumlah Tenaga TRC yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	25 Orang	
		- Jumlah Daerah Rawan Bencana	11 Kecamatan	
		- Jumlah Laporan kegiatan Forum PRB	1 Laporan	
		- Jumlah Dokumen bencana yang tersedia	1 Dokumen	
		- Jumlah Desa Tangguh Bencana	2 Desa	Kasi Kedaruratan dan Logistik
		- Jumlah jenis Bencana yang di layani	7 Jenis	
		- Jumlah Logistik yang diterima oleh korban yang terdampak bencana.	350 Paket	
		- Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang terpenuhi	30 Buah	
		- Jumlah laporan kejadian	12 laporan	

			bencana		Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		-	Jumlah Koordinasi pasca bencana	3 Kali	
		-	Jumlah Lokasi yang terkena dampak pasca bencana	11 Kec	
		-	Jumlah Desa/Kec yang di Rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya pasca bencana.	4 Desa/Kec	
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi organisasi	-	Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	Sekretariat
		-	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dapat terpenuhi sesuai aturan	16 Buah	
		-	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara dan dapat di fungsikan	23 Buah	
		-	Jumlah Administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan	5 Dokumen	
		-	Jumlah event yang di ikuti	2 Pameran	
		-	Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan	3 Dokumen	
		-	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100%	
		-	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Baik	

E. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mendukung visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dijabarkan dalam sasaran strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 3.089.653,-
				2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 646.132,-
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.611.858.215,-
				2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Rp. 1.964.201,-
		3	Administrasi umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 1.904.195,-
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 67.701.363,-
				3	Penyediaan Barang Cetak dan Penganggandaan	Rp. 6.716.193,-
				4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 145.980.000,-
		4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Rp. 65.001.674,-
				2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 43.858.450,-

			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.1.028.692.121,-
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 27.500.000,- Rp. 217.750.000,- Rp. 17.225.000.-
2	Program Penanggulangan Bencana	1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	1 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota 2 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten / Kota	Rp. 318.490.000,- Rp. 364.295.776,-
			J U M L A H		Rp. 4.922.672.948,-

Tabel 4
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi umum Perangkat Daerah	1.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.Penyediaan Barang Cetak dan Penganggunaan	Rp. 67.701.363,- Rp. 6.716.193,-

2	Meningkatkannya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana berupa penyediaan peralatan, logistik, dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	Program penanggulangan bencana	1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota 2. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten / Kota	Rp. 318.490.000,- Rp. 364.295.776,-
3	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 3.089.653,- Rp. 646.132,-
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Rp. 2.611.858.215,- Rp. 1.964,201,-
			Administrasi umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penganggandaan 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 1.904.195,- Rp. 67.701.363,- Rp. 6.716.193,- Rp. 145.980.000,-
			Penyediaan	1. Penyediaan Jasa	Rp. 65.001.674,-

			Jasa Penun- jang Urusan Pemerintahan Daerah	Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 43.858.450,- Rp.1.028.692.121, -
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeli- haraan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeli- haraan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 27.500.000,- Rp. 217.750.000,- Rp. 17.225.000.-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2022 ini merupakan laporan tahun ke Empat Renstra 2018- 2023 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu SKPD yang pengampu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten. Adapun IKU Kabupaten yang diampu oleh BPBD Kab. Tanah Laut adalah Indeks Resiko Bencana dengan capaian pada tahun 2022 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	Indeks Resiko bencana	125 (Sedang)	156,86 (Tinggi)	74,51 %

Pengkajian indeks risiko bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu wilayah (komunitas, daerah) dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan kapasitas. Secara konseptual, pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan pendekatan hubungan antara risiko bencana, bahaya, kapasitas dan kerentanan. Risiko bencana berhubungan positif/selaras dengan kehadiran bahaya dan kerentanan, serta berhubungan terbalik dengan kehadiran kapasitas.

Rentsra BNPB tahun 2019 – 2024 Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022 Dari 514 Kabupaten kabupaten/ kota di Indonesia terdapat 221 kabupaten kota yang berada pada kelas indeks risiko tinggi dan 293 yang berada pada kelas indeks risiko sedang, Salah satunya adalah Kabupaten Tanah Laut dengan Skor 156,33 kelas resiko Tinggi.

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	KELAS RISIKO 2022
1	KOTABARU	205,20	159,70	159,70	158,79	158,79	158,79	172,71	162,17	TINGGI
2	TANAH LAUT	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	156,33	TINGGI
3	BANJAR	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40	165,12	150,41	TINGGI
4	HULU SUNGAI SELATAN	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	150,00	141,29	SEDANG
5	BARITO KUALA	190,00	179,68	179,68	155,45	155,45	155,45	155,96	140,65	SEDANG
6	TABALONG	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	149,03	130,06	SEDANG
7	BALANGAN	147,20	147,20	147,20	147,20	147,20	139,89	133,77	126,16	SEDANG
8	HULU SUNGAI UTARA	128,40	128,40	128,40	128,40	128,40	128,40	126,00	126,00	SEDANG
9	HULU SUNGAI TENGAH	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	133,87	125,74	SEDANG
10	TANAH BUMBU	155,60	155,60	155,60	155,60	155,60	155,60	143,94	125,17	SEDANG
11	TAPIN	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	128,79	110,71	SEDANG
12	KOTA BANJARBARU	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	95,78	SEDANG
13	KOTA BANJARMASIN	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	84,09	SEDANG

Dengan Klasifikasi Kelas Risiko Bencana

Skor Total	Kelas	Kategori Risiko Bencana
<13	1	Rendah
13 – 144	2	Sedang
>144	3	Tinggi

Tingkat risiko bencana merupakan gabungan dari tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas yang telah dihasilkan sebelumnya. Hasil rangkuman dalam menghasilkan tingkat risiko untuk potensi bencana di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 6. Tingkat Risiko Di Kabupaten Tanah Laut

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KE-RENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
1	Banjir	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
2	Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
3	Cuaca Ekstrims	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
6	Kekeringan	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang
7	Tanah Longsor	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2017

Dari hasil penggabungan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas dapat ditentukan tingkat risiko bencana Kabupaten Tanah Laut. Tingkat risiko untuk 7 jenis bencana di Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi dengan tingkat risiko tinggi. Hal ini gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel Perbandingan Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun keempat dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan sasaran beserta indikator sasaran sesuai tabel sebagaimana di atas, maka dalam rangka membandingkan capaian sasaran antara tahun 2021 dengan 2022, sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun 2022		
			2021	2022	Target	Realisasi*	% Capaian
1	Indeks Resiko bencana	Skor	172,71 (Tinggi)	156,86 (Tinggi)	125 (sedang)	156,86 (Tinggi)	125 %
Rata-rata capaian kinerja							125 %

Sumber : <http://admin.inarisk.bnpb.go.id/login>

Perbandingan kinerja yang dicapai Kabupaten Tanah Laut dalam menurunkan Indeks risiko bencana tersebut melalui 7 Prioritas yaitu :

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem Informasi, Diklat dan Logistik
4. Penanganan Tematik Kawasan rawan bencana
5. Peningkatan Efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
7. Pengembangan Sistem pemulihan bencana

Dari 7 Prioritas tersebut terdapat 71 indikator yang harus dilengkapi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan melibatkan beberapa SKPD terkait dalam penanganan

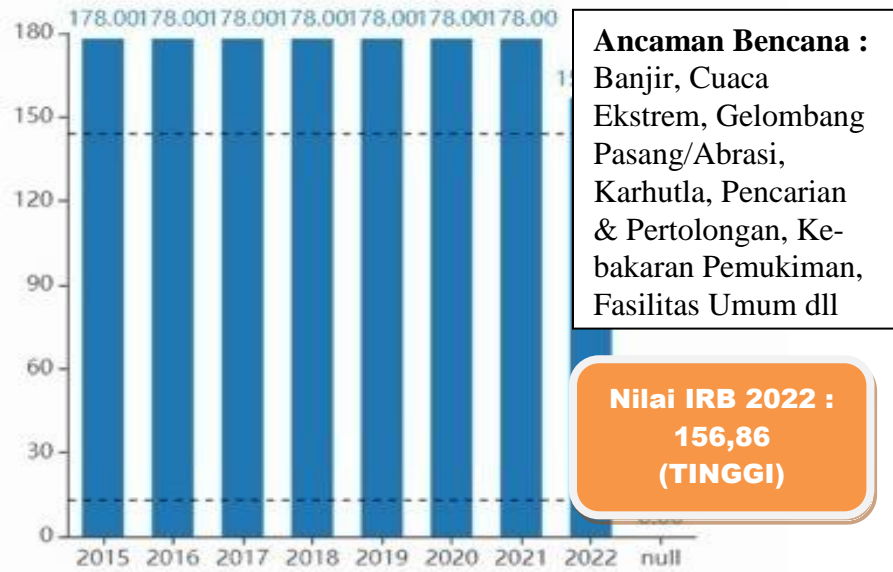
bencana untuk menurunkan trend Indeks risiko bencana di Kabupaten Tanah Laut. pada tahun 2018 IRB skor 178 dengan kelas Tinggi, Tahun 2019 skor IRB 151,36 dengan kelas Tinggi dan Tahun 2020 IRB skor 105,95 dengan kelas Sedang, dan pada tahun 2021 skor 74,17 dengan kelas sedang.



Sedangkan pada tahun 2022 beberapa Indikator yang sudah dilaksanakan atau dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan tetapi dari aplikasi Inarisk untuk tahun 2021 kebawah belum terbaca di karenakan ada error di system sehingga verifikasi lebih tinggi dari nilai tahun sebelumnya dan Indeks risiko Bencana Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 adalah 156,85 dengan kelas tinggi.

Capaian hasil Tahun 2022 dari Perhitungan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tanah Laut ke Aplikasi <http://admin.inarisk.bnppb.go.id/login>

Trend Indeks Risiko Kabupaten Tanah Laut



No	Indikator	Perbandingan						
		Banjar masin	Banjar	Tanah Bumbu	Tanah Laut	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDGs
1	Indeks Resiko bencana	84,09	150,41	125,17	156,33		138,93	

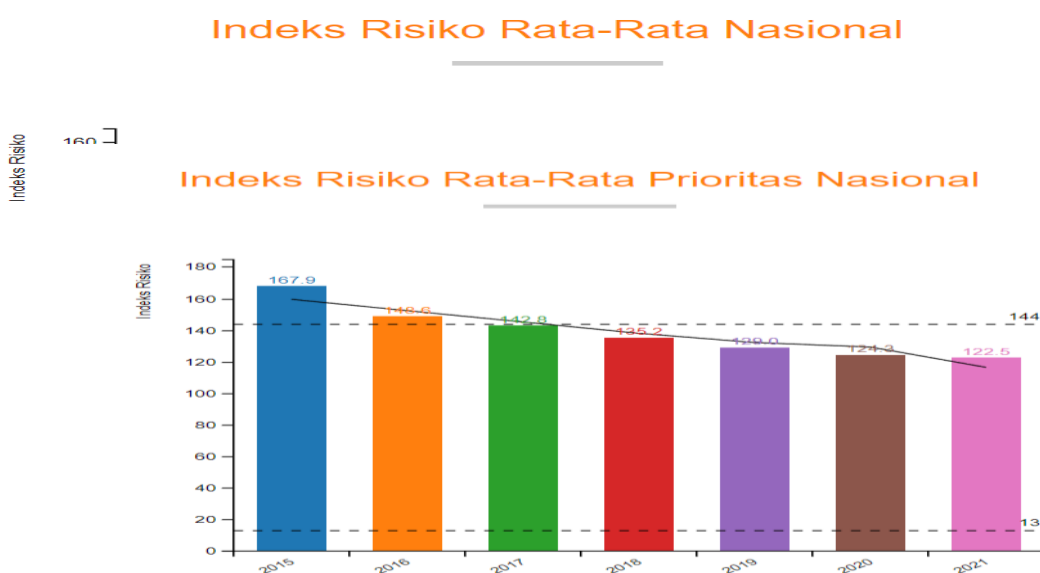
Indeks yang dikaji adalah risiko bencana. Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dengan demikian perhitungan kali ini ditekankan pada potensi kemungkinan dan besarnya dampak yang diukur dari keterpaparan (exposure) dari setiap bahaya (hazard) dan gabungan dari beberapa hazard yang ada (multi hazard). Jadi apabila kerawanan yang lalu dihitung dari data korban/kerusakan yang tercatat (data yang tersedia) untuk setiap bencana, saat ini indeks risiko ini dihitung dari potensi kemungkinan korban dan dampak yang akan ditimbulkan dari suatu bencana.

Kebijakan penurunan Indeks Risiko Bencana sampai dengan tahun 2022, pemerintah menargetkan untuk menurunkan indeks risiko bencana sebesar 30%.

Lokus penurunan indeks risiko bencana adalah 136 Kab/Kota melalui strategi menurunkan dengan cara Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana di tingkat Kab/Kota se Indonesia.

Dalam kurun waktu 2015-2019, BNPB telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional. Berbagai target yang direncanakan telah dicapai melalui pelaksanaan kegiatan. Salah satunya adalah Indeks Risiko Bencana di pusat pertumbuhan ekonomi berisiko bencana (136 kab/kota) telah berhasil diturunkan sebesar 21,74% pada tahun 2019. Sedangkan secara nasional indeks risiko bencana diturunkan sebesar 7,93 % pada tahun 2019. Pada tahun 2015 nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di pusat pertumbuhan ekonomi berisiko bencana (136 kab/kota) adalah sebesar 169,55 dan setiap tahunnya mengalami penurunan hingga menjadi 132,69 pada tahun 2019. Sedangkan nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) rata-rata nasional pada tahun 2015 sebesar 156,43 dan tahun 2019 sebesar 144,02. Untuk lebih jelasnya nilai IRBI setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut ini. Gambar 1.13. Indeks Risiko Bencana Indonesia Prioritas Nasional 136.

Untuk lebih jelasnya nilai IRBI setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut ini



Terdapat 71 Indikator yang telah disepakati dalam mewujudkan Kab/Kota Tangguh bencana yang korelasi dalam penurunan Indeks Risiko Bencana, beberapa di antaranya adalah upaya penanggulangan bencana yang telah dilakukan BNPB selama periode 2015 – 2019 dalam rangka meningkatkan kapasitas untuk mencapai sasaran kegiatan yang ada dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)
- b) Dukungan Pemasangan Peralatan Peringatan Dini
- c) Kajian Risiko Bencana
- d) Dukungan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- e) Dukungan Penyusunan Rencana Kontingensi
- f) Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB)
- g) Relawan Terlatih
- h) Penguatan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)
- i) Produk Hukum dan Kelembagaan BPBD
- j) Dukungan Dalam Penanganan Darurat Bencana

Analisis Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana merupakan kunci untuk menurunkan resiko yang ditimbulkan akibat dampak kejadian bencana. Untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut menjadikan peningkatan kapasitas sebagai sasaran strategis/utama. Untuk meminimalkan jumlah kerugian yang dapat disebabkan oleh kejadian bencana baik berupa tingkat kerugian, kerusakan maupun jumlah korban jiwa. Upaya peningkatan kapasitas dilakukan mulai dari tahap pra bencana, saat darurat bencana dan pasca bencana yang diwujudkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Tahap pra-bencana yaitu melaksanakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana memberikan Pelayanan Informasi Rawan Bencana melalui:
 - a) Sosialisasi peringatan dini bencana dalam rangka menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan yaitu mengenai peraturan dan sanksi pidana apabila warga membuka lahan atau membakar lahan dengan sengaja.
 - b) Memberikan pelatihan kepada tenaga Pusdalops PB (Pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana) untuk peningkatan kapasitas dan sumber daya anggota pusdalops BPBD Tanah Laut dalam rangka dukungan kesiapsiagaan mengenai informasi dan data kebencanaan dan Pelatihan Vertical Rescue kepada tenaga TRC (tim reaksi cepat) untuk peningkatan sumber daya manusia dalam rangka penanganan lokasi bencana, evakuasi dan penyelamatan korban bencana serta kemampuan teknis lainnya yang ada dilapangan.
 - c) Hari Kesiapsiagaan Bencana yang diperingati setiap tahun tanggal 26 April yaitu untuk memberikan informasi kepada Peserta apel (Polri, TNI, SKPD, Relawan kebencanaan dan masyarakat) untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi musim hujan yang akan terjadi bencana banjir, tanah longsor serta angin putting beliung dan menghadapi musim kemarau yang akan terjadi peningkatan kebakaran pemukiman serta hutan dan lahan.
 - d) Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Pemantauan dilakukan dengan melaksanakan posko siaga darurat dalam rangka antisipasi bencana yaitu terbentuknya kelompok/regu piket yang dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Pusdalop (Pusat Pengendali dan Operasional) Penanggulangan Bencana, dengan adanya kegiatan rutin piket penjagaan posko selama 24 jam penuh sejak bulan Januari hingga Desember, serta khususnya pada waktu-waktu tertentu seperti pada saat puncak musim hujan, pada saat libur hari raya, tahun baru, dan even tertentu. Pelaksanaan kegiatan mulai dari piket jaga, menerima laporan ke-

jadian bencana, pelaksanaan penanganan bencana dan pelaporan kejadian bencana

2. Tahap pada saat tanggap darurat yaitu pada saat terjadi bencana melalui Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana melalui :
 - a) Menyiapkan Peralatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Peralatan penanggulangan bencana yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung dalam upaya penanganan bencana. Pengadaan peralatan penanggulangan bencana meliputi peralatan untuk penanganan bencana maupun peralatan komunikasi untuk memudahkan koordinasi. Peralatan penanganan bencana terdiri atas perahu apung (perahu karet dan perahu polytheiilen), Mobil tangki air, mesin apung, jets shooter, mesin potable, pakaian tahan api, selang dan komper serta alat pendukung lainnya seperti tenda pengungsi, tenda keluarga, Velbeite, tandu, tali karmantel dan rompi pelampung serta alat komunikasi untuk mendukung proses koordinasi dalam penanganan bencana meliputi handy talky (HT).
 - b) Penanganan Bencana Alam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut berupaya melakukan penanganan kejadian secara cepat dan tepat, bersama relawan yaitu Tim Reaksi Cepat dan Pusdalop PB (Pusat Pengendali Operasil Penanggulangan Bencana). Laporan kejadian yang masuk segera ditindak lanjuti dengan pengecekan lokasi dan melakukan assesment atau kaji cepat kondisi tanggap darurat, kemudian melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti perangkat setempat, dinas terkait, polsek, TNI, maupun tim relawan untuk bersama-sama menangani bencana. Setiap kejadian bencana wajib dilaporkan kepada kepala daerah yaitu Bupati Tanah Laut dan BPBD Provinsi maupun BNPB, sebagai bentuk tindaklanjut dan dasar untuk pengajuan bantuan bagi korban bencana.

Berikut rincian jumlah kejadian masing – masing jenis bencana pada tahun 2022:

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN
1	BANJIR	28 Kali
2	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	9 Kali
3	KEBAKARAN PEMUKIMAN	30 Kali
4	CUACA EKSTREM / ANGIN KENCANG / PUTING BELIUNG	25 Kali
5	GELOMBANG PASANG / ABRASI	2 Kali
6	PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	8 Kali
TOTAL KEJADIAN		102 Kali

- c) Penanganan Bencana Alam yaitu Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanah Laut yaitu dengan Menetapkan Surat Keputusan Status Status Siaga penanganan bencana kabut asap akibat Karhutla yaitu ditetapkan sejak bulan 01 Juli s/d 30 Nopember 2022 dengan kegiatan Mendirikan pos komando di Kantor BPBD Kabupaten dan pos lapangan I di Kecamatan Bati-Bati dan di Kecamatan Tambang Ulang, pos lapangan II di Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur, Pos lapangan III di Kecamatan Takisung dan Panyipatan, Pos lapangan IV Kecamatan jorong dan Kintap,
- d) Serta Penanganan Bencana Non Alam yaitu Pelaksanaan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Tanah Laut Sosialisasi dan Edukasi tentang PMK, Percepatan pelaksanaan vaksinasi terhadap ternak, Pelaksanaan strelisasi kandang dan wilayah ternak dan Pengawasan lalu lintas ternak yang masuk dan keluar dari Kabupaten Tanah Laut
- e) Pengadaan Logistik Kebencanaan diperuntukkan bagi korban terdampak bencana maupun pengungsi dalam kondisi darurat bencana. Bantuan logistik dimaksudkan sebagai stimulan untuk membantu memenuhi kebutuhan saat masa darurat bencana, yang meliputi bahan pokok makanan (sembako) dan peralatan kebutuhan lainnya.

3. Tahap pasca bencana yaitu saat setelah terjadi bencana melalui program penanganan Pascabencana melalui :
 - a) Pemulihan Kerusakan Dampak Bencana Alam Penanggulangan bencana merupakan suatu kesatuan upaya pengurangan risiko bencana (pencegahan), penanganan bencana dan pemulihan pasca bencana. Pemulihan kerusakan dampak bencana merupakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, dengan melakukan perhitungan kebutuhan dari obyek yang mengalami kerusakan akibat dampak bencana baik berupa fasilitas umum/publik maupun rumah masyarakat pada tahun 2022 BPBD Dana stimulant (DSP) yang berasal dari BNPB diperuntukkan perbaikan rumah rusak bagi korban bencana Banjir dan Tanah Lonsor yang terjadi pada awal tahun 2021 di Kabupaten Tanah Laut.
 - b) Pelatihan dasar dalam kegiatan pasca bencana bagi aparat desa atau relawan untuk mendata kerusakan rumah, infrastruktur dan fasilitas umum lainnya.

2. CAPAIAN IKU KEPALA PELAKSANA BPBD (ES III)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan secara rangkap (*ex-officio*) dijabat oleh Sekretaris Daerah dan Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab Kepada Kepala Badan yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Adapun Sasaran Strategis Kepala Pelaksana BPBD (Eselon III) adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana dengan capaian sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja		
	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,15 (Baik)	85,25 (Baik)	86,50 (Baik)	87,55 (Baik)	88,30 (Baik)	82,81 (Baik)	83,82 (Baik)	84,50 (Baik)

Dari table tersebut dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 0,86 atau sebesar 1,02 %. Persentasi capaian kinerja tahun 2022 (84,5) terhadap target kinerja pada tahun 2022 (87,55) adalah sebesar 96,51 %, sedangkan persentasi capaian kinerja tahun 2022 (84,5) terhadap target akhir restra (88,3) adalah sebesar 95,69 %

Pada Tahun 2022 BPBD kabupaten Tanah Laut dalam pengukuran Indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilaksanakan unit pelayanan BPBD mengedarkan 150 (seratus lima puluh) kuesioner kepada masyarakat yang terdampak bencana yang didalamnya terdapat 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor IKM 84,50 dengan kategori BAIK. Dengan unsur penilaian sebagai berikut :

NO	RUANG LINGKUP	RATA-RATA SKOR	KATEGORI	PERINGKAT	Solusi Peningkatan IKM Tahun 2022
1	Persyaratan Pelayanan	3,273	Baik	7	Memberikan Informasi kejadian bencana yang cepat dan akurat ke BPBD Kab. Tanah Laut
2	Prosedur Pelayanan	3,353	Baik	3	Memberikan pemahaman yang lebih terhadap masyarakat agar lebih mendahulukan unit emer-

					gency pada saat terjadi bencana
3	Kecepatan Pelayanan	3,347	Baik	4	Melalui on call yaitu 1 x 24 Jam sudah harus di tindak lanjuti oleh Petugas TRC dan relawan BPBD
4	Kewajaran Biaya Pelayanan	4,000	Sangat Baik	1	Selalu memberikan pelayanan yang terbaik
5	Kesesuaian Produk Pelayanan antara yang Tercantum	3,300	Baik	6	Lebih memaksimalkan lagi pelayanan terhadap masyarakat
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3,307	Baik	5	Meningkatkan pembinaan dan pelatihan bagi petugas TRC
7	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3,220	Baik	8	Lebih sopan dan ramah lagi saat menerima panggilan atau menghadapi laporan untuk melakukan aksi penanggulangan bencana
8	Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	3,200	Baik	9	Lebih memaksimalkan kembali dalam pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana
9	Keadilan	3,727	Baik	2	Lebih memaksimal-

Mendapat- kan Pela- yanan				kan semua layanan pengaduan dari masyarakat
---------------------------------	--	--	--	---

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 150. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan hasil analisis data yang telah dilakukan sebagaimana terlampir, diketahui bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 84,50 berada pada kategori "BAIK" (pada interval 76,61 s/d 88,30)

Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah sebagai berikut :

Kategori Mutu Pelayanan

NILAI PER- SEPSI	MUTU PELAYANAN	NILAI INTERVAL KONVERSI	NILAI INTERVAL
		SKALA 100	SKALA 1-4
1	A (Sangat Baik)	88,31 – 100,00	3,53 – 4,00
2	B (Baik)	76,61 - 88,30	3,06 – 3,54
3	C (Kurang Baik)	65,00 – 76,60	2,60 – 3,05
4	D (Tidak Baik)	25,00 – 64,99	1,00 – 2,59

Hasil SKM tersebut diatas, terdiri dari 9 ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut yaitu :

A. Persyaratan Pelayanan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,273 berada pada 3,06 s/d 3,54 kategori "**Baik**" dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah ruang lingkup persyaratan pelayanan berada pada kategori baik.

B. Prosedur Pelayanan

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima layanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,353 berada pada interval 3,06 s/d 3,54 kategori "**Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ruang lingkup prosedur pelayanan berada pada kategori baik.

C. Kecepatan Pelayanan

Kecepatan Pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,347 berada pada interval 3,06 s/d 3,54 kategori "**Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ruang lingkup kecepatan pelayanan berada pada kategori baik.

D. Kewajaran Biaya Pelayanan

Kewajaran Biaya Pelayanan adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 4,000 berada pada interval skor 3,53 s/d 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ruang lingkup kewajaran biaya pelayanan berada pada kategori sangat baik.

E. Kesesuaian Produk Pelayanan

Kesesuaian Produk Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kesesuaian produk layanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,300 berada pada interval 3,06 s/d 3,54 kategori "**Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ruang lingkup kesesuaian produk pelayanan berada pada kategori baik.

F. Kemampuan Petugas Pelayanan

Kemampuan Petugas Pelayanan adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,307 berada pada interval 3,06 s/d 3,54 kategori "**Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ruang lingkup kemampuan petugas pelayanan berada pada kategori baik.

G. Kesopanan dan Keramahan Petugas

Kesopanan dan Keramahan Petugas adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,220 berada pada interval 3,06 s/d 3,54 kategori "**Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ruang lingkup kesopanan dan keramahan petugas berada pada kategori baik.

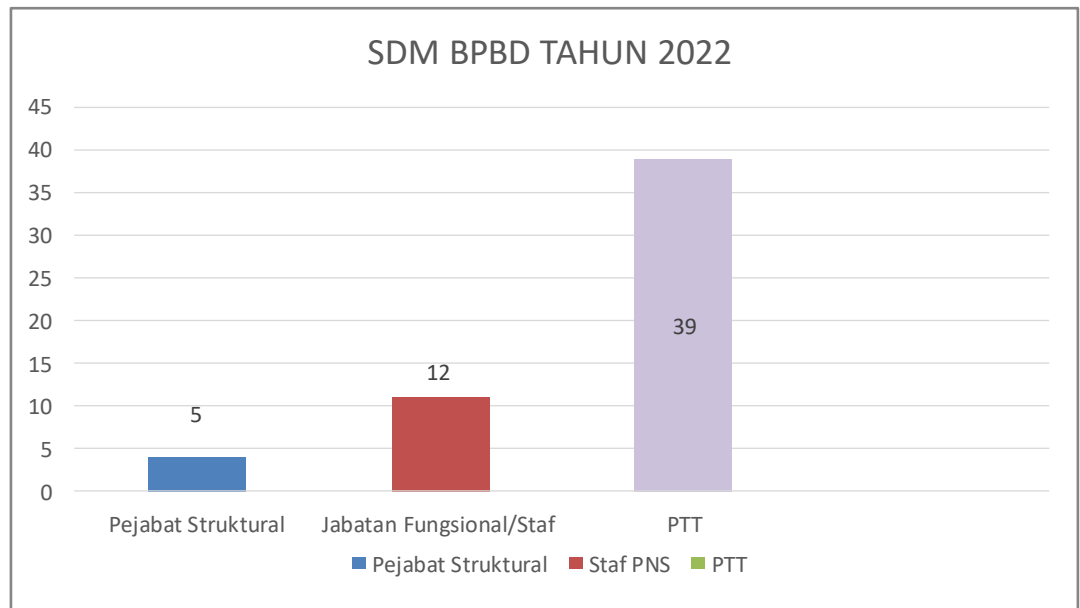
H. Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan

Kualitas Sarana dan Prasarana adalah merupakan komponen dalam kelancaran dalam penyelenggara pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,200 berada pada interval 3,06 s/d 3,54 kategori "**Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ruang lingkup kualitas sarana dan prasarana pelayanan berada pada kategori baik.

I. Keadilan Mendapatkan Pelayanan

Keadilan Mendapatkan Pelayanan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,727 berada pada interval 3,06 s/d 3,54 kategori "**Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ruang lingkup keadilan mendapatkan pelayanan berada pada kategori baik.

Capaian tersebut diperoleh dengan efisiensi penggunaan sumber daya aparatur yang terlihat pada grafik berikut :



Berdasarkan pada table diatas terlihat bahwa kinerja 56 (lima puluh enam) pegawai sesuai jumlah kebutuhan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah bisa ditangani oleh 17 (tujuh belas) pegawai ditambah dengan 39 (tiga puluh Sembilan) tenaga PTT dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Laut dengan sebutan Tenaga Administrasi 8 (delapan) orang, Rescuer 25 (Dua puluh lima) orang dan Pusdalops PB 6 orang yang ditempatkan di dikantor induk BPBD dan 3 (tiga) orang di Kecamatan Kintap.

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Pelaksana BPBD Tahun 2022 di dukung melalui 2 (Dua) Program yang terdiri atas 6 (Enam) kegiatan dan 16 (Enam Belas) Sub Kegiatan dengan realisasi sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Program Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.239.887.172	4.017.136.531,-	94,74%

	Program Penanggulangan bencana	682.785.776,	373.032.325,-	54,63%
J U M L A H		4.922.672.948 ,-	4.017.136.531,-	81,60%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada dalam mencapai target Indikator sasaran sudah hampir baik yaitu (96,51%), sedangkan persentase realisasi anggaran hanya terealisasi sebesar 81,60% sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 18,4 %.

Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat yang terdampak bencana dalam memperoleh pelayanan dari aparatur BPBD sebagai penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan serta untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pelayanan Publik yang di laksanakan Pada Tahun 2022 yaitu Penanganan Bencana Non Alam dengan menetapkan Status Siaga Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 yang berlangsung selama 243 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga) hari terhitung sejak tanggal 1 Juli s/d 28 Februari 2023 dengan surat keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/872-KUM/2022 dengan melalui Sosialisasi dan Edukasi tentang PMK, Percepatan pelaksanaan vaksinasi terhadap ternak, Pelaksanaan strelisasi kandang dan wilayah ternak dan Pengawasan lalu lintas ternak yang masuk dan keluar dari Kabupaten Tanah Laut.

Salah satu kendala dalam pencapapaian target adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya survey kepuasan masyarakat, sehingga dalam pengisian lembar kuisisioner survey masyarakat terkesan asal asalan, tidak memperhatikan secara seksama setiap pertanyaan. Hal tersebut berpengaruh pada nilai survey kepuasan masarakat BPBD.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut maka petugas survey kedepannya akan lebih memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. kedepannya, untuk meningkatkan kinerja unit pelayanan sehingga pada tahun 2023 yang akan datang bisa mencapai target, maka pada unit pelayanan yang BPBD berikan yaitu :

- Dengan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terhadap bencana yang datang dan merespon kaji cepat yaitu waktu minimal untuk menanggulangi bencana (1 x 24) jam.
- Mendistribusikan secepat mungkin logistik kepada masyarakat yang terdampak bencana maksimal 1 hari setelah terjadi bencana.

3. CAPAIAN IKU SEKRETARIS BP BD (ES IV)

Sasaran strategis Sekteraris BPBD tahun 2022 adalah meningkatkan kualitas pelayanan administrasi organisasi dengan 7 indikator kinerja utama sebagaimana berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	Persentase Capaian	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi organisasi	1	Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	100%	100%
		2	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara dan dapat difungsikan	23 Buah	23 Buah	100%

		3	Jumlah Administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
		4	Jumlah event yang di ikuti	2 Pameran	1 Pameran	50%
		5	Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		6	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%
		7	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Baik	Baik	100%

Seluruh capaian indikator kinerja utama sekretaris BPBD pada tahun 2022 telah memenuhi target yang telah ditetapkan, terkecuali satu indikator kinerja utama yang masih belum mencapai target yaitu jumlah even pameran pemerintah daerah. Sesuai target tahun 2022 jumlah even pameran pemerintah daerah yang diikuti adalah 2 pameran sedangkan BPBD hanya mengikuti 1 even pameran hari

jadi Kabupaten Tanah Laut. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh BPBD.

Sedangkan perbandingan Capaian indikator kinerja utama sekretaris BPBD pada tahun 2022 dengan capaian indikator kinerja utama sekretaris BPBD pada tahun 2021 dapat dilihat pada table sebagai berikut.

Indikator Kinerja	Capaian		Peningkatan
	2021	2022	
Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	100%	0%
Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara dan dapat difungsikan	20 Buah	23 Buah	15%
Jumlah Administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	0
Jumlah event yang diikuti	1 Pameran	1 Pameran	0
Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan	3 Dokumen	3 Dokumen	0
Persentase Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	0
Nilai Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah SKPD	71,93 BB	Baik	0

Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi organisasi capaian sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 4.239.887.172,00 terealisasi sebesar Rp. 4.017.136.531,- atau 94,74% dengan Kegiatan dan sub kegiatan:

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.735.785,00 terealisasi sebesar Rp. 3.356.400,00 atau 89,84% dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.089.653,00 terealisasi sebesar Rp. 2.812.400,00 atau 91,03%
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 646.132,00 terealisasi sebesar Rp. 544.000,00 atau 84,19%
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.613.822.416,00 terealisasi sebesar Rp. 2.074.698.592.00 atau 79.45% dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.611.858.215,00 terealisasi sebesar Rp. 2.074.698.592.00 atau 79.43%
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.964.201,00 terealisasi sebesar Rp. 1.937.400,00 atau 98.64%
- c) Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 222.301.751,00 terealisasi sebesar Rp. 213.043.808,00 atau 95,84% dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 1.904.195,00 terealisasi sebesar Rp. 1.871.000,00 atau 98,26%
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 67.701.363,00 terealisasi sebesar Rp. 61.966.858,00 atau 91,53%

- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penganggunaan dengan anggaran sebesar Rp. 6.716.193,00 terealisasi sebesar Rp. 5.360.800,00 atau 79,82%
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 145.980.000,00 terealisasi sebesar Rp. 143.845.150,00 atau 98,54%
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.137.552.220,00 terealisasi sebesar Rp. 1.092.031.381,00 atau 96,00% dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 65.001.674,00 terealisasi sebesar Rp. 45.786.295,00 atau 70,44%.
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 43.858.425,00 terealisasi sebesar Rp. 40.413.046,00 atau 92,14%.
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 1.028.692.121,00 terealisasi sebesar Rp. 1.005.832.038,00 atau 97,78%.
- e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 262.475.000,00 terealisasi sebesar Rp. 259.036.625,00 atau 98,69% dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 27.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 24.975.800,00 atau 90,82%
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 217.750.000,00 terealisasi sebesar Rp. 217.485.825,00 atau 99,88%
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 17.225,00 terealisasi sebesar Rp. 16.575.000,00 atau 96,23%

Sekretaris BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung SDM yang berkualitas walaupun dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang

tersedia namun dengan semangat dan kerja keras dari aparatur dilingkungan Sekretaris BPBD dibantu staf PNS sebanyak 7 (tujuh) orang dan PTT sebanyak 2 (dua) orang yang siap membantu dan melayani tugas dan fungsi yang dibutuhkan Organisasi. Sekretaris BPBD telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta rata-rata telah tercapai sebesar 100% sedangkan capaian realisasi anggaran untuk itu hanya terealisasi sebesar 94,74% sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 5,26%.

4. CAPAIAN KASI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN (ES IV)

Sasaran strategis Kasi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan tahun 2022 adalah Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencanadengan 6 indikator kinerja utama sebagaimana berikut :

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca	1	Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti Sosialisasi.	150 orang	0	0%
		2	Jumlah Tenaga TRC /Pusdalops yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	25 orang	26 orang	104%

bencana.	3	Jumlah daerah Rawan Bencana	11 kec	11 Kec	100%
	4	Jumlah Laporan Kegiatan forum PRB	1 Laporan	1 Laporan	100%
	5	Jumlah Dokumen Bencana yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	6	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang di bina	2 Desa	0	0

Sedangkan perbandingan Capaian indikator kinerja utama Kasi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan pada tahun 2022 dengan capaian indikator kinerja utama Kasi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan pada tahun 2021 dapat dilihat pada table sebagai berikut.

Indikator Kinerja	Capaian		Peningkatan
	2021	2022	
Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti Sosialisasi	75 orang	0	-
Jumlah Tenaga TRC / Pusdalops yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	10 orang	26 orang	160%

Jumlah Daerah rawan bencana	11 Kec	11 Kec	0
Jumlah laporan kegiatan forum PRB	1 Laporan	1 Laporan	0
Jumlah Dokumen Bencana yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	0
Jumlah Desa Tangguh Bencana yang di bina	0	0	0

Pada Tahun 2022 Kasi Pencegahan dan Kesiap Siagaan tidak mendapatkan dukungan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk mencapai target Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh 2 (dua) orang ASN yaitu Analis bencana dan Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran serta dibantu 2 (dua) orang pegawai tidak tetap. Penjelasan terkait capaian indikator kinerja utama Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Target yang ditetapkan berdasarkan masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti sosialisasi berjumlah 150 orang sedangkan realisasinya 0 orang dikarenakan untuk sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota tidak di anggarkan pada tahun 2022.
2. Jumlah tenaga TRC / Pusdalops yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat Tahun 2022 ada sebanyak 26 orang. Adapun pelaksanaan pelatihan dari Basarnas berupa pelatihan *water rescue dan high angle rescue* dengan biaya pelaksanaan di benakan kepana BASARNAS sedangkan pelatihan yang diselenggarakan oleh Vertical Rescue Indonesia biaya dibebankan kepada para peserta.
3. Jumlah daerah rawan bencana pada Tahun 2022 terjadi di 11 Kecamatan yaitu : Kecamatan Pelaihari terjadi 27 Bencana, Kecamatan Takisung terjadi 13 Bencana, Kecamatan Tambang ulang terjadi 5 Bencana, Kecamatan Bajuin terjadi 3 bencana, Kecamatan Bati-Bati terjadi 15 bencana,

Kecamatan Batu Ampar terjadi 4 Bencana, Kecamatan Bumi Makmur terjadi 2 bencana, Kecamatan Jorong terjadi 3 bencana, Kecamatan Kintap terjadi 15 bencana, Kecamatan Kurau terjadi 5 bencana dan Kecamatan Panyipatan terjadi 10 Bencana dengan total jumlah kejadian sebanyak 102 bencana di Kabupaten Tanah Laut.

4. Jumlah laporan Kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) pada tahun 2022 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 yaitu Rapat Koordinasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dilaksanakan di Ruang Rapat Barakat II Setda Tanah Laut pada jam 13.30 Wita yang di Pimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut dan dihadiri SKPD serta Perusahaan terkait.
5. Jumlah dokumen bencana yang tersedia sampai tahun 2022 sebanyak 3 Dokumen Yaitu Dokumen Rencana Penanggulangan bencana (RPB) Tahun 2019-2023, Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon).
6. Jumlah Desa Tangguh bencana pada tahun 2018 ada 3 desa yaitu di Desa penjaratan kecamatan Pelaihari, Desa Sungai Bakar Kecamatan Bajuin dan Desa Kali Besar Kecamatan Kurau dan Tahun 2019 ada 1 Desa yaitu Desa Gunung Raja di Kecamatan Tambang Ulang, Tahun 2020, Tahun 2021 dan tahun 2022 tidak ada Pembentukan

Beberapa hal yang menjadi hambatan Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pencapaian target antara lain kurangnya bahkan tidak ada anggaran yang diberikan untuk menunjang pencapaian target kinerja, sehingga Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan tidak bisa melaksanakan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat. Kegiatan Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada tahun 2022 hanya ditunjang dengan anggaran yang berasal dari sekretariat akan tetapi tidak optimal sehingga ada beberapa target kinerja yang tidak tercapai.

5. CAPAIAN KASI KEDARURATAN DAN LOGISTIK (ES IV)

Sasaran strategis Kasi Kedaruratan dan Logistik tahun 2022 adalah Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi

rekonstruksi pasca bencana dengan 4 indikator kinerja utama sebagaimana berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan partisipasi aparat dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	Jumlah jenis Bencana yang di layani	7 Jenis	6 Jenis	85%
		Jumlah logistik yang diterima oleh korban yang terdampak bencana	350 paket	86 Paket	46%
		Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang terpenuhi	30 buah	136 buah	273%
		Jumlah laporan kejadian bencana	12 laporan	12 laporan	100%

Sedangkan perbandingan Capaian indikator kinerja utama Kasi Kedaruratan dan Logistik pada tahun 2022 dengan capaian indikator kinerja utama Kasi Kedaruratan dan Logistik pada tahun 2021 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Capaian		Peningkatan
	2021	2022	
Jumlah jenis Bencana yang di layani	7 Jenis	6 Jenis	
Jumlah logistik yang diterima oleh korban yang terdampak bencana.	140 Paket	86 Paket	

Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang terpenuhi	52 buah	136 buah	
Jumlah laporan kejadian bencana	12 laporan	12 laporan	

Dari kedua tabel diatas dapat dijelaskan terkait capaian kinerja Kasi Kedaruratan dan Logistik sebagai berikut :

1. Jumlah jenis bencana yang di layani tahun 2022 sebanyak 6 jenis yaitu Bencana Banjir, Cuaca Ekstrem (angin puting beliung dan Pohon Tumbang), Gelombang Pasang/Abrasi, Kebakaran Pemukiman, Fasilitas Umum dll, Karhutla, Pencarian orang hilang. Akan tetapi pada tahun 2022 bencana Karhutla tidak terjadi di Kabupaten Tanah Laut.
2. Jumlah logistik yang diterima korban terdampak bencana untuk bantuan korban bencana pada tahun 2022 berjumlah 86 paket yang didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak bencana berupa paket sembako dari pengadaan APBD Kabupaten Tanah Laut, dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dan Bantuan dari BNPB.
3. Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang terpenuhi pada Tahun 2022 sebanyak 136 buah yang dibeli baik melalui Dana APBD Kabupaten Tanah Laut.
4. Jumlah laporan kejadian bencana pada tahun Tahun 2022 adalah 12 laporan atau setiap bulan data kejadian bencana berjumlah 1 laporan yang langsung dibuat oleh Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan bencana (Pusdalops) PB BPBD Kabupaten Tanah Laut dan di laporkan ke BPBD Provinsi Kalimantan Selatan seterusnya di lanjutkan ke BNPB Republik Indonesia.

Kasi Kesiapsiagaan dan Logistik dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh 2 (dua) ASN dan 2 (dua) PTT dan didukung dengan anggaran pada Program Penanggulangan Bencana dengan anggaran sebesar Rp.

682.785.776,00 dan terealisasi sebesar Rp. 373.032.325,00 atau 54,63% dengan Kegiatan dan sub kegiatan:

- 1) Kegiatan Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 682.785.776,00 terealisasi sebesar Rp. 373.032.325,00 atau 54,63% dengan sub kegiatan :
 - a) Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 318.490.000,00 terealisasi sebesar Rp. 52.010.000,00 atau 16,33%
 - b) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban Bencana kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 364.295.776,00 terealisasi sebesar Rp. 321.022.325 atau 88,12%

Analisa Program dan Kegiatan masih belum terealisasi belum maksimal yaitu (54,63%). Diakibatkan beberapa hal yaitu:

1. Pada Rekening Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan ini berkaitan dengan Penanganan Bencana Kabut Asap akibat kebakaran hutan dan lahan, untuk penanganannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor : 188.45/871-KUM/2022 tanggal 30 Juni 2022 Tentang Penetapan Status Siaga Penanganan Bencana Kabut Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Tanah Laut 2022, yang ditetapkan selama 152 (seratus lima puluh dua) hari terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022 s/d 30 November 2022. Walaupun berdasarkan Buletin Iklim/Cuaca dari BMKG pada bulan Juli 2022 diperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus 2022 s/d Oktober 2022, namun masih di sertai adanya hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Dengan hal tersebut maka penanganan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan (karhutla) di Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan melalui pos induk BPBD Kabupaten Tanah Laut, tidak mendirikan pos komando dan pos lapangan di Kecamatan, sehingga belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan tidak bisa di realisasikan dan perlu juga kami sampaikan berdasarkan Rekapitulasi Data Kejadian Bencana yang tercatat di Pusdalops PB BPBD Kabupaten Tanah Laut tanggal 1 Januari 2022 s/d 21

Desember 2022 untuk jenis kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hanya terjadi 9 (sembilan) kali kejadian.

2. Pada Rekening Belanja Penanganan Bencana ini digunakan untuk pembayaran personil TRC/RESCUE, Pusdalops PB dan Relawan pada setiap terjadinya penanganan bencana di wilayah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 188.45/33-KUM/2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Besaran Honorarium Tim Operasional Penanganan Bencana BPBD Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2022. Untuk pembayaran Honorarium personil penanganan bencana ini dibayarkan kepada setiap personil TRC/Rescue, Pusdalops PB dan Relawan sesuai dengan jumlah kegiatan bencana yang di tangani jadi realisasinya sangat tergantung kepada jumlah kejadian bencana yang dilakukan penanganan, makin banyak juga realisasi pembayarannya, begitu juga sebaliknya.

6. CAPAIAN KASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (ES IV)

Sasaran strategis Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi tahun 2022 adalah Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana dengan 3 indikator kinerja utama sebagaimana berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik	Jumlah koordinasi pasca bencana	3 kali	0	0
		Jumlah Lokasi yang terdampak pasca bencana	11 Kec	11 Kec	100%

	dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	Jumlah Desa/Kec yang Rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya pasca bencana.	4 Desa / Kec	0	0
--	--	---	--------------	---	---

Pada Tahun 2022 Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi tidak mendapatkan dukungan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga seluruh target yang ditetapkan tidak bisa dicapai. Ketidak ada anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi kemudian akan berdampak pada ketidak mampuan pencapaian target. Hal tersebut telah berulang mulai dari tahun 2021 hingga 2022 dikarenakan tidak ada sub kegiatan penyelenggaraan pasca bencana kabupaten/kota, sampai pada tahun 2023 sudah ada Sub Kegiatan Penangan Pasca Bencana Kab/Kota. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh 1 (dua) orang ASN yaitu Pengadministrasi Umum serta dibantu 1 (satu) orang pegawai tidak tetap.

B. CAPAIAN KEUANGAN

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2022

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp. 4.922.672.948,00 terealisasi sebesar Rp. 4.017.136.531,00 atau 81,60% yang terdiri dari :

- **Belanja Operasi**

Jumlah belanja Operasi ditetapkan sebesar Rp. 4.583.896.955,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.701.186.206,00 atau 80,74% berisi 2 (dua) belanja yaitu :

- Belanja pegawai PNS dianggarkan sebesar Rp. 2.611.858.215,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.074.698.592,00 atau 79,43%
- Belanja Barang dan Jasa dianggarkan Rp.1.972.038.740,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.626.487.614,00 atau 82,48%

- **Belanja Modal**

Berisi belanja Modal Peralatan dan Mesin ditetapkan sebesar Rp. 338.775.993,00 terealisasi sebesar Rp. 315.950.325,00 atau 93,26%.

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan DPA-SKPD tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 4.922.672.948,00 Dari anggaran tersebut telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program yang terdiri atas 6 (Enam) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan. Dari semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah terealisasi dengan baik, Realisasi menurut sasaran dan Program tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Program Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	74.417.556	67.327.658	90,47%

2	Meningkatnya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana berupa penyediaan peralatan, logistik, dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	Program Penanggulangan bencana	682.785.776	373.032.32	54,63%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi organisasi	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.165.469.616	3.949.808.873	94,82%
J U M L A H			4.922.672.948	4.017.136.531	81,60%

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022

Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021 terdapat terdapat 2 (Dua) Program yang terdiri atas 8 (Delapan) kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) Sub Kegiatan sedangkan Tahun 2022 terdapat 2 (Dua) Program yang terdiri atas 6 (Enam) kegiatan dan 16 (Enam Belas) Sub Kegiatan. Berikut adalah table penyajian perbandingan sebagai berikut:

No	2021		2022	
	Program	Kegiatan	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan		Evaluasi Kinerja

		Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Perangkat Daerah Pameran Pembangunan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pameran Pembangunan		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
	Administrasi umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	Administrasi umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

		Kantor	rah	Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengang-gandaan		Penyediaan Ba-rang Cetak dan Pengang-gandaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kon-sultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Per-lengkapan Kantor		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayan-an Umum Kantor		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Ken-daraan Dinas Operasional atau	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penun-jang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeli-haraan dan Pa-jak Kendaraan Perorangan Di-

		lapangan		nas atau kendaraan dinas jabatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota		
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota		
		Penanganan Pas-cabencana Kabupaten / Kota		
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban		Penyediaan Logistik Penyelamatan

		Bencana Kabupaten / Kota		dan Evakuasi korban Bencana Kabupaten / Kota
	Total Anggaran	5.178.307.742,00-	Total Anggaran	4.922.672.948,00 ,-

Berikut adalah perbandingan Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dan tahun 2022 dapat di lihat dibawah ini

NO	TAHUN 201		TAHUN 2022	
	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Langsung	Jumlah
1	Belanja Pegawai	2.327.832.388	Belanja Pegawai	2.611.858.215
2	Belanja Barang dan Jasa	2.829.317.114	Belanja Barang dan Jasa	1.972.038.740
3	Belanja Modal	21.158.240	Belanja Modal	338.775.993
	Total	5.178.307.742,-	Total	4.922.672.948,-

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui Laporan Kinerja (LKj) ini.

Secara umum rata-rata pencapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sesuai Rencana Stratejik Tahun 2018-2023 yang terdiri atas 3 (tiga) sasaran dalam tahun 2022 telah mencapai mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, meskipun dalam pelaksanaan belum bisa dicapai secara maksimal. Bila dibanding dengan tahun 2021 dengan jumlah pencapaian sasaran tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 ada yang mengalami kenaikan, hal ini dengan adanya capaian nilai rata –rata semua unsur pelayanan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilaksanakan unit pelayanan BPBD mengedarkan 150 (seratus lima puluh) kuesioner kepada masyarakat yang terdampak bencana yang didalamnya terdapat 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor IKM 84,50 kategori BAIK. Dengan nilai B (memuaskan) menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada umumnya sudah baik dan merasa sangat puas dengan pelayanan penanggulangan bencana bagi masyarakat yang terkena dampak langsung bencana baik karena faktor alam, bencana non alam dan bencana sosial.
2. Sasaran 2 juga mengalami penurunan dengan kejadian bencana yang di tangani oleh BPBD Tahun 2022 sebanyak 102 Kali kejadian, sedangkan Tahun 2021 yang ditangani sebanyak 183 kali sehingga kejadian mengalami penurunan dari pada tahun 2022.

sasaran ini dilihat dari beberapa Faktor yang mempengaruhi yaitu :

1. Dari bulan Juli hingga September, curah hujan di wilayah Indonesia lebih tinggi dari rata-rata jangka panjang. Hal ini diakibatkan oleh

musim hujan yang tiba lebih awal dan efek berkelanjutan dari fenomena La Nina. Sebagian besar wilayah di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, dan bagian selatan Sumatera mengalami curah hujan di atas kondisi normal, sedangkan bagian utara Sumatera, Kalimantan, dan Papua mengalami curah hujan di bawah rata-rata jangka Panjang yang mengakibatkan kondisi yang lebih kering, sehingga kejadian bencana dari tahun terjadi penurunan kejadian.

2. Meningkatnya kesiapsiagaan dan peran serta masyarakat dalam pengurangan resiko bencana melalui Pelatihan, sosialisasi dan simulasi agar masyarakat atau kelompok peduli bencana (relawan) yang indeks resiko bencana tinggi di daerahnya bisa menggulangi bencana terlebih dahulu sebelum petugas kebencanaan/TRC datang dan Kesiapsiagaan juga untuk melakukan pemantauan dan mendeteksi informasi dari BMKG tentang Peringatan dini terhadap suatu bencana kepada masyarakat dan peningkatan aparatur di kabupaten maupun di kecamatan dalam penanggulangan bencana, pelaksanaan status darurat bencana maksimal 14 hari setelah bencana terjadi dengan memberikan dukungan logistik yang tersedia berupa sandang dan pangan yang akan didistribusikan kepada korban yang terdampak bencana serta terfasilitasinya masyarakat/kelompok masyarakat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi korban pasca bencana melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya.
3. Sasaran 3 juga mengalami kenaikan di karenakan pelayanan di bidang administrasi perkantoran sebagai penunjang untuk meningkatkan penanggulangan bencana terhadap masyarakat melalui indikator penilaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM).

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dibuat dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sampai tahun 2022 masih banyak kendala-kendala yang harus

dicarikan solusinya untuk peningkatan kinerja Permasalahan yang terjadi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2022, adalah :

- a) Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang belum dapat dilaksanakan karena besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana tersebut.
- b) Pada saat musim kemarau Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sulit untuk dipadamkan apabila kebakaran hutan tersebut tidak bisa dijangkau oleh armada BPBD.
- c) Klasifikasi BPBD yang masih Type B mengakibatkan kesulitan untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi BPBD sebagai Komando, Koordinator dan Pelaksana lapangan pada saat tanggap darurat bencana karena stakeholder yang di komando dan di koordinasikan yaitu setingkat Eselon II.
- d) Kelengkapan dan alat-alat pengaman personil yang belum memadai dan belum berstandar nasional.

Solusi

- a) Peningkatan sarana dan prasarana pendukung tugas operasional lapangan seperti kendaraan damkar, rescue, dan peralatannya (baik untuk kebutuhan lapangan maupun untuk kelengkapan pengaman personil).
- b) Untuk hutan dan lahan yang tidak bisa dilalui oleh armada maka dilakukan dengan water bombing itu pun harus menghubungi pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut selalu berkoordinasi dengan BMKG tentang prakiraan bencana di yang terjadi selama tahun 2021.
- d) Adanya dukungan lintas sektoral untuk kelancaran operasional lapangan

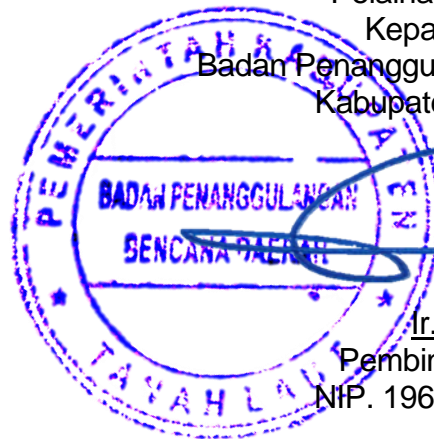
Demikian Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut Tahun 2022, semoga memberikan informasi yang berarti bagi yang memerlukan serta menjadi tolok ukur terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Pelaihari, Januari 2023

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tanah Laut



Ir. SAHRUDIN

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19661210 199403 1 001

L A M P I R A N



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. SAHRUDIN**
Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BPBD**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **H. SUKAMTA**
Jabatan : **BUPATI TANAH LAUT**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

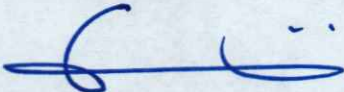
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI TANAH LAUT


H. SUKAMTA

PIHAK PERTAMA
KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. TANAH LAUT


Ir. SAHRUDIN
Nip. 19661210 199403 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KAB. TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana	Baik
		- Indeks Resiko Bencana	125 (Sedang)

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		4.062.700.732,00	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.735.785,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.569.122.416,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.851.254,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.102.516.277,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.475.000,00	
2.	Program Penanggulangan Bencana		715.482.685,00	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	715.482.685,00	
JUMLAH			Rp. 4.778.183.417,00	

Pelaihari, Januari 2022

BUPATI TANAH LAUT

H. SUKAMTA

**KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. TANAH LAUT**

Ir. SAHRUDIN
Nip. 19661210 199403 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL. A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NURIAH, S.Sos**
Jabatan : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. SAHRUDIN**
Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BPBD**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 03 Januari 2022

PIHAK KEDUA
KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. TANAH LAUT

Ir. SAHRUDIN
Nip. 19661210 199403 1 007

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS

NURIAH, S.Sos
Nip. 19740320 199503 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KAB. TANAH LAUT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Organisasi	- Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%
		- Jumlah sarana dan prasarana yang dapat terpenuhi dan di fungsikan sesuai aturan	16 Buah
		- Jumlah administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan	5 Dokumen
		- Jumlah event yang di ikuti	2 Pameran
		- Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan	3 Dokumen
		- Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai dengan ketentuan	5 Laporan
		- Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD	1 Laporan

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		4.062.700.732,00	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.735.785,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.569.122.416,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.851.254,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.102.516.277,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.475.000,00	
JUMLAH			Rp. 4.062.700.732,00	

Pelaihari, 03 Januari 2022

**KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. TANAH LAUT**



Ir. SAHRUDIN
Nip. 19661210 199403 1 007

SEKRETARIS



NURIAH, S.Sos
Nip. 19740320 199503 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL. A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EDY SISWOYO, A.Md**
Jabatan : **Plt. KASI PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. SAHRUDIN**
Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BPBD**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 03 Januari 2022

PIHAK KEDUA
KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. TANAH LAUT

Ir. SAHRUDIN
Nip. 19661210 199403 1 007

PIHAK PERTAMA
Plt. KASI PENCEGAHAN
DAN KESIAPSIAGAAN

EDY SISWOYO, A.Md
Nip. 19821106 201502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KAB. TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana berupa penyediaan peralatan, logistik, dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	- Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti sosialisasi	150 orang
		- Persentase Tenaga TRC/Pusdalpos yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	25 Orang
		- Jumlah daerah rawan bencana	11 Kecamatan
		- Jumlah laporan kegiatan forum PRB	1 Dokumen
		- Jumlah dokumen bencana yang tersedia	1 Dokumen
		- Jumlah desa tangguh bencana	2 Desa

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ket
1.	Program Penanggulangan Bencana			
JUMLAH			Rp. -	

Pelaihari, 03 Januari 2022

**KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. TANAH LAUT**



Ir. SAHRUDIN
Nip. 19661210 199403 1 007

**Plt. KASI PENCEGAHAN
DAN KESIAPSIAGAAN**



EDY SISWOYO, A.Md
Nip. 19821106 201502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JUNI H, S. Pi**
Jabatan : **KASI PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. SAHRUDIN**
Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BPBD**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 24 Februari 2022

PIHAK KEDUA
KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. TANAH LAUT

Ir. SAHRUDIN
Nip. 19661210 199403 1 007

PIHAK PERTAMA
KASI PENCEGAHAN
DAN KESIAPSIAGAAN

JUNI H, S. Pi
Nip. 19700101 201001 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KAB. TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana berupa penyediaan peralatan, logistik, dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	- Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti sosialisasi	150 orang
		- Persentase Tenaga TRC/Pusdalpos yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	25 Orang
		- Jumlah daerah rawan bencana	11 Kecamatan
		- Jumlah laporan kegiatan forum PRB	1 Dokumen
		- Jumlah dokumen bencana yang tersedia	1 Dokumen
		- Jumlah desa tangguh bencana	2 Desa

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ket
1.	Program Penanggulangan Bencana		-	
JUMLAH			Rp. -	

Pelaihari, 24 Februari 2022

**KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. TANAH LAUT**



Ir. SAHRUDIN
Nip. 19661210 199403 1 007

**KASI PENCEGAHAN
DAN KESIAPSIAGAAN**



JUNI H. S. Pi
Nip. 19700101 201001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BAKTI PURWANTO, ST**
Jabatan : **KASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. SAHRUDIN**
Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BPBD**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 03 Januari 2022

PIHAK KEDUA
KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. TANAH LAUT

Ir. SAHRUDIN
Nip. 19661210 199403 1 007

PIHAK PERTAMA
KASI REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI

BAKTI PURWANTO, ST
Nip. 19800608 201001 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KAB. TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana berupa penyediaan peralatan, logistik, dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	- Jumlah koordinasi pasca bencana	3 Kali
		- Jumlah lokasi yang terdampak pasca bencana	11 Kecamatan
		- Jumlah desa/kecamatan yang di rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, psikologis, ekonomi dan budaya pasca bencana.	4 Desa

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ket
1.	Program Penanggulangan Bencana		-	
JUMLAH			Rp. -	

Pelaihari, 03 Januari 2022

**KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. TANAH LAUT**



Ir. SAHRUDIN
Nip. 19661210 199403 1 007

**KASI REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI**



BAKTI PURWANTO, ST
Nip. 19800608 201001 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL. A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HUSAIRI, A.Md**
Jabatan : **KASI KEDARURATAN & LOGISTIK**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. SAHRUDIN**
Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BPBD**

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 03 Januari 2022

PIHAK KEDUA
KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. TANAH LAUT

Ir. SAHRUDIN
Nip. 19661210 199403 1 007

PIHAK PERTAMA
KASI KEDARURATAN
DAN LOGISTIK

HUSAIRI, A.Md
Nip. 19660505 199002 1 001

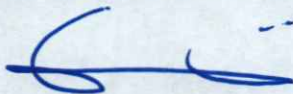
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KAB. TANAH LAUT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana berupa penyediaan peralatan, logistik, dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	- Bencana yang di layani sesuai SOP	1 Kecamatan
		- Jumlah korban bencana yang menerima logistik	1 x 24 Jam
		- Jumlah sarana dan prasarana yang dipenuhi sesuai dengan standar operasional	350 Paket
		- Jumlah laporan yang terdampak bencana	30 Buah

No.	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Ket
1.	Program Penanggulangan Bencana		715.482.685,00	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	715.482.685,00	
JUMLAH			Rp. 715.482.685,00	

Pelaihari, 03 Januari 2022

**KEPALA PELAKSANA
BPBD KAB. TANAH LAUT**



Ir. SAHRUDIN
Nip. 19661210 199403 1 007

**KASI KEDARURATAN
DAN LOGISTIK**



HUSAIRI, A.Md
Nip. 19660505 199002 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL. A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TEGUH HERIYADI**

Jabatan : Bendahara

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NURIAH, S.Sos**

Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 03 Januari 2022

Sekretaris

NURIAH, S.Sos
NIP.19740320 199503 2 005

Bendahara

TEGUH HERIYADI
NIP. 19790205 200701 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL. A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Membuat dan mengajukan permintaan pembayaran SPP (Gaji, UP, GU dan Tambahan Penghasilan) kepada Pengguna Anggaran berdasarkan DPA, Anggaran Kas dan SPD beserta lampirannya.	Jumlah dokumen pembayaran SPP (Gaji, UP, GU dan Tambahan Penghasilan)	35 Dokumen
2	Membuat laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan setiap bulan berdasarkan pengeluaran sesuai rekening.	Jumlah dokumen laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan setiap bulan	20 Dokumen
3	Melakukan pembayaran atas tagihan / kwitansi berdasarkan prosedur yang telah ditentukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan di unit kerja.	Jumlah tagihan / kwitansi berdasarkan prosedur yang telah dilaksanakan	700 Kwitansi
4	Memungut, menyetorkan, membukukan dan melaporkan pajak belanja barang dan jasa.	Jumlah dokumen laporan pajak belanja barang dan jasa	200 Dokumen
5	Mendokumenkan seluruh bukti pengeluaran serta dokumen lainnya secara tertib dan teratur.	Jumlah dokumen bukti pengeluaran	13 Dokumen
6	Melaksanakan tugas pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.	Jumlah laporan tugas pimpinan	60 Kegiatan
7	Melaksanakan Rekonsiliasi Keuangan ke BPKAD Kab. Tanah Laut.	Jumlah laporan Rekonsiliasi	3 Laporan

8	Mengontrol ketersediaan dana atas transaksi keuangan	Jumlah berkas ketersediaan dana	12 Berkas
---	--	---------------------------------	-----------

Pelaihari, 03 Januari 2022

Sekretaris



NURIAH, S.Sos
NIP.19740320 199503 2 005

Bendahara



TEGUH HERIYADI
NIP. 19790205 200701 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EDY SISWOYO, A.Md**

Jabatan : Verifikator Keuangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NURIAH, S.Sos**

Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris

NURIAH, S.Sos

NIP.19740320 199503 2 005

Pelaihari, 03 Januari 2022

Verifikator Keuangan

EDY SISWOYO, A.Md

NIP. 19821106 201502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
.	1	2	3
1	Menerima dan menyortir bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan serta buku kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan/penelitian.	Jumlah dokumen hasil sortir bukti pengeluaran dan penerimaan serta buku kas sesuai mata anggaran	1358 SPJ
2	Meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan buku kas agar diketahui apakah telah sesuai dengan peruntukannya.	Jumlah dokumen hasil pencocokkan bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan	1358 SPJ
3	Melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Jumlah laporan pemeriksaan terhadap alat bukti	1358 SPJ
4	Melaporkan hasil temuan pemeriksaan kepada atasan untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan pimpinan.	Jumlah laporan hasil temuan pemeriksaan yang dilaporkan	12 Laporan
5	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan.	Jumlah laporan tugas kedinasan lain	120 Laporan

Sekretaris

NURIAH, S.Sos
NIP.19740320 199503 2 005

Pelaihari, 03 Januari 2022

Verifikator Keuangan

EDY SISWOYO, A.Md
NIP. 19821106 201502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABDULAH HAIDI**

Jabatan : Pengadministrasi Keuangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NURIAH, S.Sos**

Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris

NURIAH, S.Sos
NIP.19740320 199503 2 005

Pelaihari, 03 Januari 2022
Pengadministrasi Keuangan

ABDULAH HAIDI
NIP. 19730106 200701 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL. A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian.	Jumlah administrasi keuangan yang disortir	12 Dokumen
2	Memberi lembar pengantar pada administrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian.	Jumlah administrasi keuangan yang diberi lembar pengantar	12 Dokumen
3	Mengelompokkan administrasi keuangan atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Jumlah administrasi keuangan yang dikelompokkan	12 Dokumen
4	Mendokumentasikan administrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi.	Jumlah dokumen hasil dokumentasi administrasi keuangan	12 Dokumen
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	12 Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	33 Laporan

Sekretaris

NURIAH, S.Sos
NIP.19740320 199503 2 005

Pelaihari, 03 Januari 2022
Pengadministrasi Keuangan

ABDULAH HAIDI
NIP. 19730106 200701 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAHYUNI**

Jabatan : Pengadministrasi Keuangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NURIAH, S.Sos**

Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris

NURIAH, S.Sos
NIP.19740320 199503 2 005

Pelaihari, 03 Januari 2022
Pengadministrasi Keuangan

WAHYUNI
NIP. 19790307 200701 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL. A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian.	Jumlah administrasi keuangan yang disortir	12 Dokumen
2	Memberi lembar pengantar pada administrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian.	Jumlah administrasi keuangan yang diberi lembar pengantar	12 Dokumen
3	Mengelompokkan administrasi keuangan atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian.	Jumlah administrasi keuangan yang dikelompokkan	12 Dokumen
4	Mendokumentasikan administrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi.	Jumlah dokumen hasil dokumentasi administrasi keuangan	12 Dokumen
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	25 Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	28 Laporan

Sekretaris

NURIAH, S.Sos
NIP.19740320 199503 2 005

Pelaihari, 03 Januari 2022

Pengadministrasi Keuangan

WAHYUNI
NIP. 19790307 200701 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BAKHRAM**

Jabatan : Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NURIAH, S.Sos**

Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 03 Januari 2022

Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

Sekretaris

NURIAH, S.Sos
NIP.19740320 199503 2 005

BAKHRAM
NIP. 19740704 200903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Mencatat barang pengeluaran inventaris kantor sesuai hasil pendistribusian untuk mengetahui jumlah dan jenis barang yang dikeluarkan.	Jumlah barang pengeluaran inventaris kantor	19 Buah
2	Menerima, meneliti dan menghitung setiap penerimaan barang inventaris penyimpanan barang.	Jumlah barang yang diterima, diteliti dan dihitung sesuai inventaris penyimpanan barang	20 Buah
3	Melakukan inventarisasi barang inventaris kantor dengan mencocokkan data ril barang sesuai petunjuk pelaksanaan untuk mengetahui kondisinya dan tertib administrasi.	Jumlah dokumen inventaris kantor	3 Dokumen
4	Membuat daftar inventaris ruangan guna mengetahui barang apa yang ada diruangan tersebut.	Jumlah daftar inventaris ruangan	2 Dokumen
5	Membuat daftar inventaris barang guna mengetahui jumlah dan kondisi barang yang dimiliki badan.	Jumlah daftar inventaris barang	2 Dokumen
6	Memberi kode penomoran sesuai data, Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) guna memudahkan pengecekan dan penginventarisian.	Jumlah dokumen kode penomoran sesuai data	4 Dokumen
7	Mendistribusikan barang inventaris barang kantor kepada unit sesuai dengan kebutuhan untuk ketersediaan kebutuhan kantor.	Jumlah distribusi inventaris kantor	20 Buah
8	Mengurus perbaikan dan perawatan barang dan aset agar tetap terjaga dan dalam keadaan layak pakai.	Jumlah kegiatan mengurus perbaikan dan perawatan barang	165 Kali
9	Merencanakan perbaikan dan pemeliharaan berdasarkan pendataan lapangan supaya aset terjaga dengan baik.	Jumlah kegiatan merencanakan perbaikan dan pemeliharaan	165 Kali

10	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	130 Kali
----	---	--	----------

Pelaihari, 03 Januari 2022

Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

Sekretaris



NURIAH, S.Sos

NIP.19740320 199503 2 005



BAKHRAM

NIP. 19740704 200903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LARATNA HANDAYANI**

Jabatan : Pengadministrasi Perencanaan Dan Program

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NURIAH, S.Sos**

Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris

NURIAH, S.Sos
NIP.19740320 199503 2 005

Pelaihari, 03 Januari 2022
**Pengadministrasi Perencanaan
Dan Program**

LARATNA HANDAYANI
NIP. 19730725 200701 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi perencanaan dan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian.	Jumlah administrasi perencanaan dan program yang disortir	60 Surat
2	Memberi lembar pengantar pada administrasi perencanaan dan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah administrasi perencanaan dan program yang diberi lembar pengantar	60 Surat
3	Mengelompokkan administrasi perencanaan dan program atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian.	Jumlah administrasi perencanaan dan program yang dikelompokkan	50 Dokumen
4	Mendokumentasikan administrasi perencanaan dan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi.	Jumlah administrasi perencanaan dan program yang didokumentasikan	50 Dokumen
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	30 Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	60 Laporan

Sekretaris

NURIAH, S.Sos
NIP.19740320 199503 2 005

Pelaihari, 03 Januari 2022
Pengadministrasi Perencanaan
Dan Program

LARATNA HANDAYANI
NIP. 19730725 200701 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **USWATUN HASANAH**

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **NURIAH, S.Sos**

Jabatan : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris

NURIAH, S.Sos
NIP.19740320 199503 2 005

Pelaihari, 03 Januari 2022
Pengadministrasi Umum

USWATUN HASANAH
NIP. 19721003 199203 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian.	Jumlah administrasi umum yang disortir	270 Kegiatan
2	Memberi lembar pengantar pada administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian.	Jumlah administrasi umum yang diberi lembar pengantar	180 Kegiatan
3	Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian.	Jumlah administrasi umum yang dikelompokkan	20 Dokumen
4	Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi.	Jumlah administrasi umum yang didokumentasikan	20 Dokumen
5	Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan baik secara lisan maupun tertulis.	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	100 Kegiatan

Sekretaris

NURIAH, S.Sos

NIP.19740320 199503 2 005

Pelaihari, 03 Januari 2022

Pengadministrasi Umum

USWATUN HASANAH

NIP. 19721003 199203 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMAD JAIN**

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HUSAIRI, A.Md**

Jabatan : Kasi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kasi Kedaruratan & Logistik

Pelaihari, 03 Januari 2022
Pengadministrasi Umum

HUSAIRI, A.Md
NIP.19740320 199503 2 005

MUHAMAD JAIN
NIP. 19810715 200701 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
.	1	2	3
1	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah administrasi umum yang disortir	73 Dokumen
2	Memberi lembar pengantar pada administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah administrasi umum yang diberi lembar pengantar	73 Dokumen
3	Mengelompokkan administrasi umum atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Jumlah administrasi umum yang dikelompokkan	73 Dokumen
4	Mendokumentasikan administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah administrasi umum yang didokumentasikan	73 Dokumen
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	12 Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	100 Laporan

Kasi Kedaruratan & Logistik

HUSAIRI, A.Md
NIP.19740320 199503 2 005

Pelaihari, 03 Januari 2022
Pengadministrasi Umum

MUHAMAD JAIN
NIP. 19810715 200701 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NADA SUNA MAULIDAMAYANTI AGUSTININGTYAS, A.Md**

Jabatan : Pranata Bencana

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HUSAIRI, A.Md**

Jabatan : Kasi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kasi Kedaruratan & Logistik

Pelaihari, 03 Januari 2022

Pranata Bencana

HUSAIRI, A.Md

NIP.19740320 199503 2 005

**NADA SUNA MAULIDAMAYANTI
AGUSTININGTYAS, A.Md**

NIP. 19960808 202012 2 027



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
.	1	2	3
1	Mengumpulkan bahan-bahan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan SOP untuk pedoman pelaksanaan tugas.	Jumlah dokumen bahan-bahan penyelenggaraan penanggulangan bencana	30 Dokumen
2	Mengolah bahan objek kerja menjadi materi di bidang bencana berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.	Jumlah laporan bahan objek kerja menjadi materi	30 Laporan
3	Melaksanakan pelayanan kepada para korban yang tertimpa bencana berdasarkan SOP yang berlaku untuk kelancaran tugas.	Jumlah pelayanan kepada para korban	30 Kegiatan
4	Mengevaluasi hasil kerja di bidang bencana berdasarkan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.	Jumlah laporan hasil kerja dibidang bencana	30 Kegiatan
5	Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas secara tertulis dan lisan kepada atasan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban.	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	30 Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kegiatan kedinasan dapat berjalan dengan lancar.	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	30 Laporan

Kasi Kedaruratan & Logistik

HUSAIRI, A.Md

NIP.19740320 199503 2 005

Pelaihari, 03 Januari 2022

Pranata Bencana

NADA SUNA MAULIDAMAYANTI

AGUSTININGTYAS, A.Md

NIP. 19960808 202012 2 027



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHKMAD ALFIANNOOR**

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **BAKTI PURWANTO, ST**

Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi


BAKTI PURWANTO, ST
NIP. 19800608 201001 1 010

Pelaihari, 03 Januari 2022
Pengadministrasi Umum


AHKMAD ALFIANNOOR
NIP. 19740220 200701 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
.	1	2	3
1	Menerima, mencatat dan menyortir surat masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah administrasi umum yang disortir	130 Surat
2	Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah administrasi umum yang diberi lembar pengantar	130 Surat
3	Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Jumlah administrasi umum yang dikelompokkan	130 Surat
4	Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah administrasi umum yang didokumentasikan	130 Surat
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	130 Surat
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	130 Laporan

Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi


BAKTI PURWANTO, ST
NIP. 19800608 201001 1 010

Pelaihari, 03 Januari 2022
Pengadministrasi Umum


AHKMAD ALFIANNOOR
NIP. 19740220 200701 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUAIBATUL AHMAD**

Jabatan : Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **EDY SISWOYO, A.Md**

Jabatan : Plt. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Plt. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pelaihari, 03 Januari 2022
Pengemudi Mobil Pemadam
Kebakaran

EDY SISWOYO, A.Md
NIP.19821106 201502 1 001

SUAIBATUL AHMAD
NIP. 19740506 201001 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL A. Syairani. Telp. (0512) 21113. Fax. (0512)(21300) Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara mengecek rem, oli dan lampu di mesin, air radiator, air aki dan tekanan udara ban agar kendaraan dapat dikendarai dengan baik	Jumlah laporan pemeriksaan kerusakan kelengkapan kendaraan	70 Laporan
2	Mengemudikan kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku agar kendaraan dapat tiba di tujuan dengan selamat.	Jumlah kegiatan mengemudi kendaraan	80 Laporan
3	Merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin, ruangan dalam dan luar kendaraan agar kendaraan kelihatan bersih.	Jumlah kegiatan perawatan kendaraan	70 Laporan
4	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	45 Laporan
5	Memperbaiki kerusakan kecil agar kendaraan dapat beroperasi secara layak.	Jumlah kegiatan perbaikan kerusakan kecil	50 Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	75 Laporan
7	Memanaskan mesin kendaraan guna mengetahui kelainan mesin	Jumlah kegiatan memanaskan mesin	70 Laporan

Plt. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

EDY SISWOYO, A.Md
NIP.19821106 201502 1 001

Pelaihari, 03 Januari 2022
Pengemudi Mobil Pemadam
Kebakaran

SUAIBATUL AHMAD
NIP. 19740506 201001 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kebencanaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

FUNGSI :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kebencanaan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dibidang kebencanaan, baik pra bencana, tanggap darurat bencana, pasca bencana, serta penanganan pengungsi secara cepat, dan dapat dipertanggung jawabkan
- Pembinaan, pelatihan, pengawasan dan pengendalian pelaksana teknis
- Pengelolaan urusan kesekretariatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Makna alasan memilih IKU dan rumus penghitungan	Penanggungjawab	Sumber Data
1	Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bencana terhadap masyarakat	1. 'Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak Bencana 2. Indeks Resiko Bencana	<p>Makna Indikator</p> <p>1. SKM ini yang paling sering digunakan karena dilakukan melalui survey masyarakat. SKM digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>2. Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probalitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah</p> <p>Alasan pemilihan indikator</p> <p>Bencana menganalisis risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari suatu bahaya berdasarkan analisa bahaya, Kerentanan dan kapasitas dari suatu daerah. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana kepada masyarakat melalui simulasi dan pelatihan dengan bahaya (hazard) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (multi hazard) tersebut.</p> <p>Rumus perhitungan</p> <p>1. Hasil Survey Masyarakat</p> <p>2. Risk=Hazard x $\frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$</p>	<p>Seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan</p> <hr/> <p>Seksi Kedaruratan dan logistik</p> <hr/> <p>Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p>	<p>2. Hasil Penilaian</p> <p>2. Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah</p>

Kepala Pelaksana
BPB Kab. Tanah Laut



Ir. SAHRUDIN

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690315 199803 1 012

Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan bencana terhadap masyarakat
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat
Indikator : Indeks Resiko Bencana

**POHON KINERJA BPBD
KAB. TANAH LAUT
TAHUN 2022**

1. Melakukan Layanan Administrasi Perkantoran
Indikator :
Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP

2. Melakukan Pembelian Sarana dan Prasarana Kantor
Indikator :
Jumlah sarana dan prasarana yang dapat terpenuhi sesuai aturan

3. Melakukan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Indikator :
Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara dan dapat di fungsikan

4. Melakukan pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Indikator :
Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan

5. Mengikuti Pameran Pembangunan
Indikator :
Jumlah Event yang di ikuti

1. Melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan dan Keuangan
Indikator :
Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan.

2. Menyusun laporan keuangan dan kinerja
Indikator :
- Persentase Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu
- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD

1. Melakukan sosialisasi Kewaspadaan dini bencana
Indikator :
Jumlah Masyarakat /kelompok masyarakat yang mengikuti Sosialisasi

2. Melakukan Pelatihan dan Simulasi
Indikator :
Jumlah Masyarakat/Kelompok masyarakat yang mengikuti pelatihan dan simulasi

3. Mengikuti Pelatihan Teknis TRC/Pusdalops
Indikator :
Jumlah Tenaga TRC yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat

4. Melakukan Pemantauan wilayah rawan bencana yang di dapat dari informasi BMKG, masyarakat, Instansi terkait dan pemantauan secara langsung.
Indikator :
Jumlah Daerah Rawan Bencana

5. Melakukan Rekonsiliasi Data bencana
Indikator :
Jumlah Laporan Data bencana yang diapdate

6. Melakukan Pembinaan Desa Tangguh Bencana
Indikator :
Jumlah Desa Tangguh bencana

7. Pemenuhan Sarana posko Penanggulangan Bencana
Indikator ;
Jumlah posko penanggulangan bencana di Kecamatan.

1. Melakukan layanan Penanganan Bencana
Indikator :
Jumlah jenis bencana yang dilayani

2. Memberikan Fasilitas Bantuan logistik dari BPBD dan Pihak terkait.
Indikator :
Jumlah logistik yang diterima oleh korban yang terdampak bencana

3. Pemenuhan sarana dan Prasarana / Peralatan Bencana
Indikator :
Jumlah Sarana dan Prasarana kebencanaan yang di terpenuhi

4. Melakukan Pendataan korban yang terdampak Bencana Alam
Indikator :
jumlah laporan kejadian Bencana

1. Menfasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap Korban pasca bencana
Indikator :
Jumlah koordinasi pasca bencana

2. Melakukan monitoring pasca bencana.
Indikator :
jumlah lokasi yang terdampak pasca bencana.

3. Melakukan Pembinaan pasca bencana
Indikator :
Jumlah Desa/Kecamatan yang di Rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya pasca bencana

CAPAIAN PER TRIWULAN I s/d IV TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	PROGRAM	ANGGARAN PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET OUTPUT KEGIATAN PER TRIWULAN			
					(Rp)		(Rp)		(Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masyarakat yang terdampak bencana	Baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.239.887.172	Administrasi Umum Perangkat Daerah	222.301.751	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	67.701.363 6.716.193	Jumlah jenis (36 Jenis) Jumlah Jenis (6 Jenis)	Triwulan I	10 Jenis		
											Triwulan II	15 Jenis		
											Triwulan III	14 Jenis		
											Triwulan IV	11 Jenis		
		Indeks Risiko Bencana (Skor)	130 (Sedang)	Program Penanggulangan Bencana	682.785.776	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	682.785.776	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	318.490.000	Jumlah Penanganan Bencana 102 kali	Triwulan I	23 Kali		
											Triwulan II	5 Kali		
											Triwulan III	23 Kali		
											Triwulan IV	51 Kali		
2	Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam pengurangan bencana berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi konstruksi pasca bencana	Jumlah Jenis Bencana yang dilayani	7 Jenis					Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	318.490.000	Jumlah jenis 7 Jenis	Triwulan I	23 Kali		
											Triwulan II	5 Kali		
											Triwulan III	23 Kali		
											Triwulan IV	51 Kali		
		Jumlah logistik yang diterima oleh korban yang terdampak bencana	300 Paket			Program Penanggulangan bencana	682.785.776	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			364.295.776	Jumlah Paket 84 paket	Triwulan I	9 Paket
													Triwulan II	4 Paket
													Triwulan III	12 Paket
													Triwulan IV	61 paket
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kebencanaan yang terpenuhi	25 buah									Jumlah Unit 52 buah	Triwulan I	-
													Triwulan II	2 unit
													Triwulan III	35 unit
													Triwulan IV	15 unit
		Jumlah Laporan Kejadian bencana	12 laporan									Jumlah Laporan 12 Laporan	Triwulan I	3 Laporan
													Triwulan II	3 Laporan
													Triwulan III	3 Laporan
													Triwulan IV	3 Laporan

Pelaihari, Januari 2023
Kepala Pelaksana



Ir. SAHRUDIN
N.p. 19661210 199403 1 007

MATRIK KESELARASAN

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN ANGGARAN 2023

No.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA SARGIS	IKU BUKAN IKU	NO.	PROGRAM			KEGIATAN		SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)		KET	
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TERKAIT		TIDAK TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	15	16	17
1	Tercapainya kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang terdampak bencana	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) masyarakat	IKU	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Meningkatnya kualitas kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Terlaksananya kegiatan peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	tersedianya alat tulis kantor	Jumlah jenis (36 Jenis)	67.701.363,00		
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		tersedianya barang cetakan dan penggandaan						Jumlah Jenis (6 Jenis)	6.716.193,00				
			2	Indeks Risiko Bencana (IRB)		2	Program Penanggulangan Bencana	Terwujudnya penanggulangan an Bencana yang dapat dirasakan oleh masyarakat	Prosentase penurunan Index Resiko Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota			
2	Tercapainya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulan bencana berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	Meningkatnya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulan bencana berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	3	Jumlah Masyarakat/Kelompok masyarakat yang mengikuti sosialisasi	BUKAN	1						Penyediaan Logistik penyelamatan dan Evakuasi korban bencana kabupaten / kota	Tersedianya Penyediaan Logistik penyelamatan dan Evakuasi korban bencana kabupaten / kota	Jumlah Jenis (8 Jenis)	364.295.776,00		
			4	Jumlah Tenaga TRC / Pusdalops yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	BUKAN	2											
			5	Jumlah Daerah Rawan Bencana	BUKAN	3											
			6	Jumlah Laporan kegiatan Forum PRB	BUKAN	4											
			7	Jumlah Dokumen bencana yang tersedia	BUKAN	5											
			8	Jumlah Desa Tangguh bencana	BUKAN	6											
												Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Penanganan bencana sesuai SOP	Jumlah Jenis (7 Jenis)	318.490.000,00		

			18	Jumlah administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan	BUKAN	16									
			19	Jumlah Event yang diikuti	BUKAN	17									
			20	Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan	BUKAN	18									
			21	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	BUKAN	19									
			22	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	BUKAN	20									

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			65.001.674,00 43.858.425,00 1.028.692,121,00				
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1. Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penyusunan perencanaan dan keuangan dengan baik dan tepat waktu	1. Jumlah Dokumen RKA, Jumlah Dokumen Perubahan RKA, Jumlah Dokumen Penyusunan DPA, Jumlah Dokumen Penyusunan DPA, 2. Jumlah Dokumen Perencanaan 3. Jumlah orang atau bulan pembayaran Gaji 4. Jumlah Dokumen Keuangan		Rp. 3.089.653,00 Rp. 646.132,00 Rp. 2.611.858.215,00 Rp. 1.964.201,00				
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									

Pelaihari, Januari 2023
Mengetahui,
Kepala pelaksana BPBD



Ir. SAHRUDIN
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19661210 199403 1 001

**CAPAIAN RENSTRA BPBD KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2019 - 2023**

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
		Indek Resiko Bencana (IRB) (Skor)	150 (Tinggi)	135 (Sedang)	130 (Sedang)	125 (Sedang)	120 (Sedang)
2	Meningkatnya partisipasi aparaturnya dan masyarakat dalam penanggulangan bencana berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah Masyarakat/Kelompok masyarakat yang mengikuti sosialisasi	275 orang	120 orang	150 orang	150 orang	160 orang
		Jumlah Tenaga TRC/Pusdalops yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang
		Jumlah Daerah Rawan Bencana	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec
		Jumlah Laporan Kegiatan Forum PRB	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Dokumen Bencana yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Jumlah Desa Tangguh bencana	3 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa
		Jumlah Jenis Bencana yang dilayani	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis
		Jumlah Logistik yang diterima oleh korban terdampak bencana	250 Paket	300 Paket	300 paket	350 Paket	350 Paket
		Jumlah Sarana dan Prasarana kebencanaan yang di penuhi	27 Buah	19 buah	25 Buah	30 Buah	35 buah
		Jumlah laporan kejadian bencana	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
		Jumlah koordinasi pasca bencana	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali
		Jumlah Lokasi yang terdampak pasca bencana.	11 Kec	11 Kec	11 kec	11 kec	11 kec
		Jumlah Desa/Kecamatan yang di Rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya pasca bencana.	4 Desa / Kec	4 Desa / Kec	4 Desa / Kec	4 Desa / Kec	4 Desa / Kec
3	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Organisasi	Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah sarana dan prasarana yang dapat terpenuhi sesuai aturan	6 Buah	14 Buah	15 Buah	16 Buah	17 Buah
		Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara dan dapat di fungsikan	19 Buah	20 Buah	22 Buah	23 Buah	25 Buah
		Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
		Jumlah Event yang di ikuti	2 Pameran	2 Pameran	2 Pameran	2 Pameran	2 Pameran

	Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik



Palohari, Januari 2023
Kepala Pelaksana BPBD

Ir. SAHRUDIN

Pembina TK. I (IV.b)

NIP. 19661210 199403 1 007